SINERGi

Menguatkan Integritas, Meneguhkan Pelayana



Mahyeldi Ansharullah

Percepat Penanganan Bencana

DAFTAR ISI

3 Tajuk Redaksi: Belajar dari Krisis, Menguatkan Kepemimpinan Publik PKS

4 Artikel Utama : Ketua BP3U "Kepemimpinan di Tengah Badai"

7 Artikel Ketua Fraksi DPR Di Garis Depan Bencana Nasional

11 Sambutan Sekjen PKS Bencana sebagai Ujian Akuntabilitas Sistem

15 Sambutan Presiden PKS Solidaritas Di Tengah Luka Negeri

20 Artikel Ketua DSP Menjaga Saudara, Menegakkan Amanah: Arahan Syariah tentang Solidaritas di Tengah Bencana

24 Artikel Anggota MPP Menjaga Indonesia Di Titik Rapuh: Arah Kemanusiaan Dan Kepemimpinan

29 Artikel Ketua Majelis Syura Me-nyelam Di Arus Takdir: Membaca Ulang Kepemim-pinan, Kemanusiaan, dan Amanah Kita

34 Indonesia Di Atas Gelagar Air: Membaca Peta Risiko 2025

43 Menjaga Amanah Di Era Risiko: Manifesto Singkat Untuk Kepala Daerah PKS

49 Jati Diri Negarawan Jalan Menuju Kesejahteraan: Pangkas Underground Economy & Rent Seeking

54 Wawancara dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah "Di Balik Banjir dan Longsor Sumatra: Masalah Lama yang Menuntut Keberanian Baru"

60 Wawancara Bang TJ, Korlap Satgas Penanggulangan Bencana DPP PKS

64 Rumah Kepemimpinan Srikandi di Garis Depan: Peran Istri Pejabat Publik PKS dalam Peduli Bencana

70 Kiprah Pejabat Publik, Struktur dan Kader PKS saat bencana

71 PKS Setia Mengawal Legislasi Kebencanaan!

73 Infografis – Di Garis Depan Bencana Nasional

74 Menata Ekosistem Informasi: Mengapa Pejabat Publik Membutuhkan Tim Penguat Pesan yang Solid

78 Saat Bencana Tak Lagi "Hanya Alam", tetapi "Sistem"

82 Infografis

83 Parpol, Krisis Iklim, dan Perta-ruhan Masa Depan Indonesia

TIM PENGARAH: ● Presiden PKS ● Sekjen PKS ● Ketua BP3U ● Ketua Fraksi PKS DPR RI ● Ketua KSP. ● Ketua Bidang Komdigi **TIM PENGARAH KONTEN** ● Ketua BP3U Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. ● Sekretaris BP3U dr. H. Pamungkas Hendra Kusuma ● Wakil Sekretaris BP3U Arief Rahman Hakim, S.I.Kom ● Kabiro Pembinaan Pejabaf Publik: Teddy Rusmawan, AT., MM. ● Kabiro Data Perencanaan: dr. Helmi Budiman, MM. ● Kabiro Monev: Dr. H. Agung Budi Margono, ST., MT. ● Kabiro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik: Hj. Nevi Zaurina ● Kabiro Sistem Pendukung : H. Riza Falepi, ST., MT. **TIM REDAKSI** ● Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si. ● Dr. Apiatno, SE, MSi ● Daud Abdullah, STP **TIM PRODUKSI** ● Hafidz Muftisany ● Adiela ● Lisa Epriani ● Faiz Ayyas ● Boy Hamidy

Belajar dari Krisis

Menguatkan Kepemimpinan Publik PKS

Bencana besar di Sumatera kembali mengungkap persoalan mendasar dalam tata kelola ruang dan pengawasan lingkungan. Banjir yang meluas bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi hasil dari akumulasi kebijakan yang longgar, termasuk pemberian izin lahan yang tidak diikuti pengendalian ketat. Penegasan Gubernur Sumatera Barat mengenai hal ini menambah urgensi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan dan perizinan.

Dalam konteks tersebut, edisi majalah ini disusun sebagai bekal refleksi bagi pejabat publik PKS. Krisis menuntut kompetensi teknis sekaligus ketegasan moral; pejabat publik perlu hadir bukan hanya sebagai simbol empati, tetapi sebagai penggerak perbaikan kebijakan dari hulu ke hilir.

Gerak cepat struktur kader, relawan, serta jaringan perempuan PKS yang turun membantu penyintas menunjukkan bahwa infrastruktur sosial partai dapat bekerja efektif. Namun, kerja lapangan hanya satu sisi. Pejabat publik PKS dituntut memastikan bahwa respon darurat terhubung dengan pembenahan tata kelola: pengawasan lahan yang lebih ketat, perbaikan tata ruang, dan koordinasi lintas sektor yang disiplin.

> Edisi ini mengajak pejabat publik PKS melihat bencana sebagai momentum pembelajaran institusional

Pertimbangan mengenai penetapan status Bencana Nasional pun menjadi uji kepemimpinan. Keputusan demikian menuntut keberanian menempatkan keselamatan warga di atas pertimbangan lainnya, sekaligus kesiapan untuk bertindak berdasarkan data dan proyeksi risiko jangka panjang.

Edisi ini mengajak pejabat publik PKS melihat bencana sebagai momentum pembelajaran institusional. Indonesia tidak kekurangan kapasitas; yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian memperbaiki pola yang keliru, dan komitmen menempatkan keselamatan rakyat sebagai mandat tertinggi.

Kepemimpinan yang kuat bukan hanya hadir ketika bencana tiba, tetapi memastikan agar kerentanan serupa tidak terus berulang. Edisi ini diharapkan menjadi dorongan untuk melangkah ke arah itu.

KETUA BP3U DPP PKS Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

Kepemimpinan di Tengah Badai

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kenyataan yang kini berdiri di depan mata kita: bencana datang semakin sering, semakin tak terduga, dan semakin menguji kualitas kepemimpinan kita. Dalam situasi demikian, jabatan bukan lagi mahkota; ia berubah menjadi ujian ketangguhan jiwa. Banjir, longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan—semuanya menuntut satu tipe pemimpin: pemimpin yang tidak hanya hadir di podium, tetapi juga hadir di lumpur, di tenda pengungsian, di hati masyarakat yang sedang goyah.

Di titik inilah makna kepemimpinan diuji tanpa kompromi. Dalam edisi perdana SINERGI, Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa "pemimpin sejati bukan yang menikmati fasilitas, tetapi yang menanggung beban." Ungkapan itu kini terasa semakin relevan—karena setiap kali seorang pejabat publik berdiri di hadapan penyintas bencana, pertanyaan tentang integritas menjadi nyata, bukan retorika.

Namun kita juga perlu melihat bencana dari sisi yang lebih dalam: ia bukan hanya musibah, tetapi juga surat peringatan. Setiap banjir bandang, setiap longsor, setiap kerusakan ekologis mengajak kita bercermin—apakah ada kebijakan yang terlalu longgar? Apakah ada regulasi yang dikeluarkan tanpa kehati-hatian? Apakah ada izin yang diberikan tanpa menimbang daya dukung alam dan keselamatan manusia? Kita harus berani bertanya, jangan sampai kebijakan yang lahir dari meja kita justru menjadi awal dari musibah bagi orang lain.



Setiap pemimpin perlu menyadari bahwa kepemimpinan sejatinya adalah amanah yang berat. Amanah itu tidak berhenti di hadapan konstituen, atasan, lembaga, atau negara. la melampaui itu semua—amanah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan Allah telah memperingatkan kita dengan tegas:
"Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah ia diperbaiki." (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini bukan sekadar pengingat spiritual, tetapi petunjuk etis bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang tanpa sadar membiarkan kerusakan tumbuh di bawah kebijakan yang kita tanda tangani.

Sebagai BP3U, kami kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar program tambahan, tetapi inti dari nilai kepemimpinan PKS. Kita tidak ingin pejabat publik yang hanya gesit di panggung, tetapi hilang arah ketika sirene tanda bahaya mulai terdengar. Kita membutuhkan pemimpin yang turun paling dulu, dan pulang paling akhir—karena dari sanalah lahir wibawa moral yang tidak bisa dibeli oleh apa pun.

Hari ini, bencana tidak hanya menguji sistem; ia juga menguji jiwa. la bertanya, tanpa suara: apakah pejabat publik kita hadir ketika rakyat menjerit? Apakah ia memilih kenyamanan gedung pemerintahan, atau memilih berada di tengah warga yang kehilangan rumahnya? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan konferensi pers—ia hanya bisa dijawab dengan langkah kaki yang benar-benar menjejak lokasi bencana.

Dalam dunia yang berubah cepat, kepemimpinan bencana menuntut tiga hal yang tidak bisa ditawar: ketepatan membaca risiko, kecepatan mengambil keputusan, dan ketulusan mendengar mereka yang paling lemah. Dan jauh

"Kita membutuhkan pemimpin yang turun paling dulu, dan pulang paling akhir—karena dari sanalah lahir wibawa moral yang tidak bisa dibeli oleh apa pun."

Pejabat publik PKS bukan hanya perumus anggaran, tetapi penjaga keselamatan warga; bukan sekadar pengambil kebijakan, tetapi pengemban amanah di medan krisis

lebih dalam dari itu, bencana menuntut kejernihan hati: apakah seorang pemimpin benar-benar hadir untuk warganya, atau hanya hadir untuk dikenal hadir.

PKS ingin memastikan bahwa seluruh pejabat publiknya dibentuk dengan prinsip itu. Bahwa mereka memahami bahwa legitimasi bukan dibangun dari kata-kata, tetapi dari kehadiran yang menyembuhkan. Bahwa kekuatan bukan terletak pada jumlah pengawal, tetapi pada keberanian untuk berdiri satu meter di depan warga ketika keadaan paling gelap.

Sekali lagi, kita kembali diingatkan oleh pesan Sohibul Iman dalam edisi sebelumnya: "Semakin besar kewenangan, semakin sempit ruang privat seorang pemimpin." Dalam konteks bencana, makna itu semakin terasa: seorang pemimpin harus siap kehilangan kenyamanannya agar masyarakat tidak kehilangan harapannya.

Edisi kedua SINERGI ini kami hadirkan sebagai ruang refleksi, penguatan, dan konsolidasi jiwa. Kita ingin menyatukan visi: bahwa pejabat publik PKS bukan hanya perumus anggaran, tetapi penjaga keselamatan warga; bukan sekadar pengambil kebijakan, tetapi pengemban amanah di medan krisis; bukan hanya pemimpin saat keadaan tenang, tetapi pelindung ketika badai menghantam.

Semoga edisi ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah kita. Agar setiap pejabat publik PKS terus melatih diri—ketegasannya, nalarnya, empatinya, dan kecepatannya. Karena di tengah dunia yang penuh risiko dan ketidakpastian, rakyat tidak hanya menunggu pemimpin yang mampu; mereka menunggu pemimpin yang hadir.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi

: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
Ketua BP3U DPP PKS

KETUA FRAKSI PKS DPR RI **Dr. H Abdul Kharis Almasyhari, Msi.**

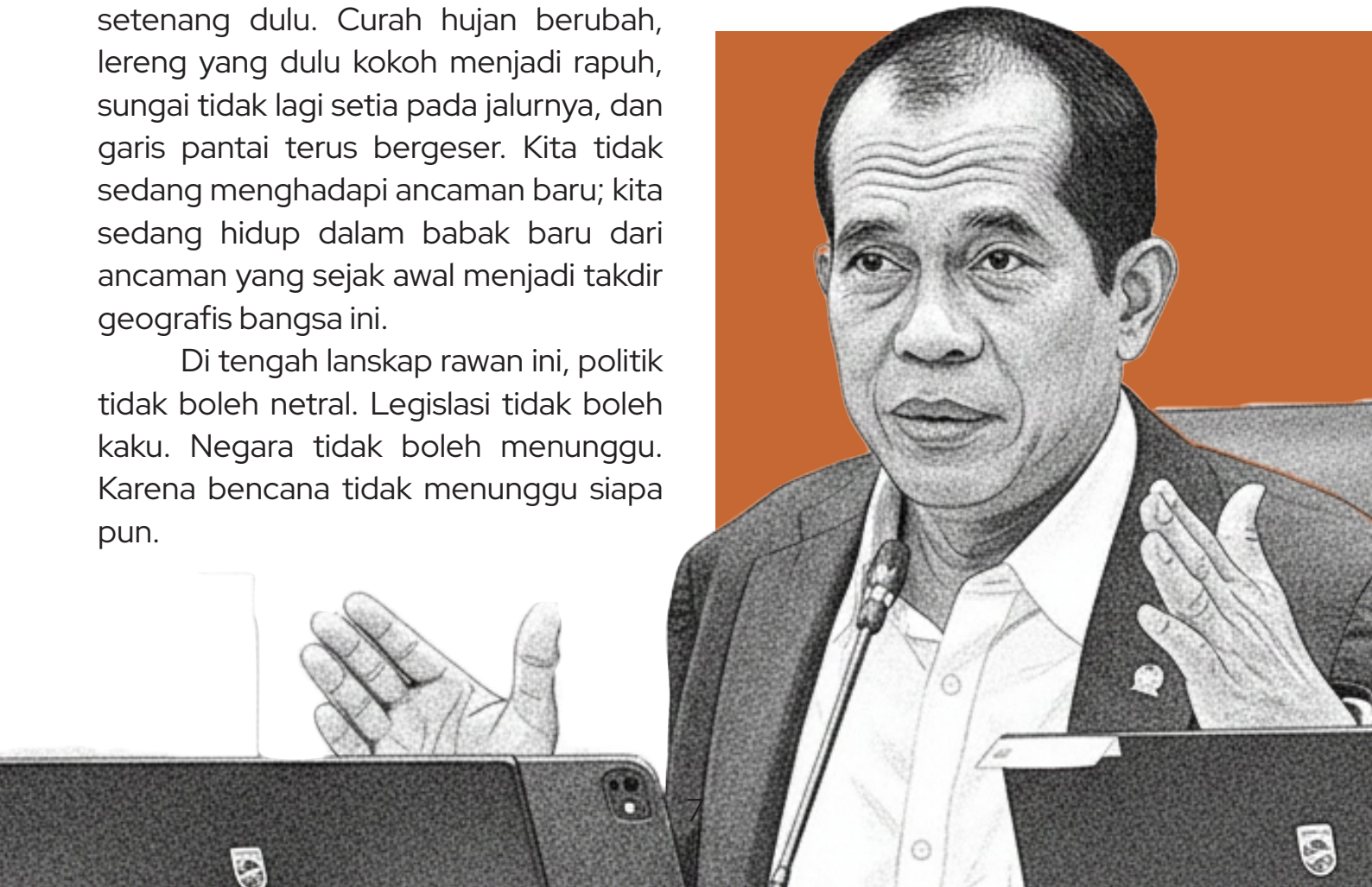
Di Garis Depan Bencana Nasional

Melindungi nyawa rakyat adalah kewajiban negara yang tidak dapat dinegosiasikan

Indonesia hidup di atas ring of fire dan di tengah sebuah zaman ketika udara, laut, dan tanah tidak lagi setenang dulu. Curah hujan berubah, lereng yang dulu kokoh menjadi rapuh, sungai tidak lagi setia pada jalurnya, dan garis pantai terus bergeser. Kita tidak sedang menghadapi ancaman baru; kita sedang hidup dalam babak baru dari ancaman yang sejak awal menjadi takdir geografis bangsa ini.

Di tengah lanskap rawan ini, politik tidak boleh netral. Legislasi tidak boleh kaku. Negara tidak boleh menunggu. Karena bencana tidak menunggu siapa pun.

Di Fraksi PKS DPR RI, kami memegang satu prinsip yang tidak pernah goyah: melindungi nyawa rakyat adalah kewajiban negara yang tidak dapat dinegosiasikan. Prinsip itu menjadi kompas dalam setiap sikap, setiap rapat, setiap perdebatan, dan setiap keputusan yang kami ambil terkait mitigasi bencana. Dan prinsip itu pula yang membuat kami sering mengambil jalan yang tidak populer, tetapi perlu.





BNPB Tidak Boleh Dipreteli

Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana beberapa waktu lalu, pemerintah mengusulkan agar pengaturan tentang BNPB dipindahkan dari Undang-Undang ke Peraturan Presiden. Alasannya: fleksibilitas. Bagi kami, alasan itu tidak cukup untuk sebuah urusan yang menyangkut jutaan nyawa.

BNPB bukan sekadar lembaga teknis. Ini adalah pilar utama negara dalam keadaan krisis. Menurunkan kedudukannya hanya akan menjadikan manajemen bencana rentan perubahan politik dan selera kekuasaan. Kami menolak itu. Karena birokrasi yang rapuh akan membuat rakyat menjadi korban dari kerentanan yang disengaja.

Kami ingin BNPB dipertegas, bukan diperkecil. Diperkuat, bukan digeser. Memiliki garis komando yang tegas, bukan sekadar koordinatif. Dalam situasi darurat, kepastian komando adalah perbedaan antara hidup dan mati.

Anggaran Mitigasi Tidak Boleh Jadi Sisa

Setiap tahun, Indonesia menghadapi lebih dari tiga ribu kejadian bencana. Ribuan rumah rusak, ratusan nyawa melayang, dan jutaan orang terdampak. Namun seringkali anggaran mitigasi ditempatkan sebagai pelengkap, bukan prioritas. Padahal, mitigasi adalah investasi: mencegah kerusakan jauh lebih murah dan bermartabat dibanding memperbaikinya setelah semuanya runtuh.

Karena itu, kami memperjuangkan mandatory spending minimal dua persen APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana yang bersifat preventif. Tanpa angka yang mengikat, daerah-daerah dengan fiskal lemah akan selalu lumpuh sebelum bertindak. Tanpa komitmen hukum, mitigasi akan tetap menjadi jargon, bukan program.

Kami tahu usulan ini keras. Tapi lebih keras lagi ketika kami melihat daerah-daerah yang tidak punya cukup

dana untuk membangun tanggul, memperbaiki hulu sungai, atau melatih relawan. Tidak sedikit kabupaten yang bahkan tidak punya dana darurat yang memadai. Ketika bencana datang, mereka hanya bisa menunggu pusat — dan itu sering terlambat.

Bencana tidak menunggu administrasi selesai. Karena itu, negara harus hadir lebih dulu.

Ekologi Adalah Hulu Mitigasi

Mitigasi bukan hanya soal sirene dan peringatan dini. Ia dimulai jauh di hulu — di hutan, di tata ruang, di izin industri, di Amdal, dan di bagaimana kita memperlakukan alam. Indonesia tidak hanya rawan bencana alam; kita juga sedang menciptakan bencana ekologis dengan tangan kita sendiri.

Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Fraksi PKS menolak penghapusan ketentuan minimal 30 persen tutupan hutan. Angka itu bukan angka politik. Itu angka ilmiah. Jika hulu gundul, hilir akan tenggelam. Jika hutan dibuka tanpa kendali, banjir dan longsor hanya soal waktu.

Kami juga mengkritik pelemahan Amdal dan pembatasan partisipasi publik. Ketika analisis lingkungan dipotong, kita sedang menandatangani bencana berikutnya. Ketika masyarakat dibatasi suaranya, kita sedang mencabut rem darurat terakhir yang dimiliki alam.

Bagi kami, politik kebencanaan adalah politik menjaga ekologi. Menjaga hutan adalah menjaga rumah rakyat. Mencegah deforestasi adalah mencegah duka yang tidak perlu.

Mengawasi Negara Agar Tidak Lalai

Fungsi pengawasan DPR menjadi penting dalam situasi negara yang penuh risiko. Kami berkali-kali mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem peringatan dini yang kerap rusak dan tidak terawat. Kami meminta audit tata ruang di berbagai daerah pasca banjir bandang. Kami mengkritik komunikasi pejabat

Fraksi PKS memiliki satu tradisi, memotong gaji anggota dewan setiap kali terjadi bencana besar. Ini bukan pengganti kebijakan, tetapi simbol bahwa kami tidak ingin menjadi politisi yang hanya berbicara dari podium

yang kurang empatik dan kadang menyakiti korban.

Negara tidak hanya harus kuat; negara harus peka. Teknologi tidak hanya harus ada; harus berfungsi. Kebijakan tidak hanya harus tertulis; harus ditegakkan.

Kami juga menolak pemangkasan anggaran BNPB dan Basarnas. Di tengah kenaikan eksponensial kejadian bencana, pemotongan anggaran adalah langkah mundur.

Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk bencana benar-benar menjadi penyelamat, bukan formalitas.

Membangun Ketangguhan dari Desa

Bencana selalu terjadi di tingkat lokal. Karena itu, mitigasi harus dimulai di desa. Kami mendorong penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) agar bukan hanya menjadi program seremonial, tetapi mendapat dukungan anggaran, pelatihan, dan fasilitas komunikasi darurat.

Kami ingin relawan lokal terlatih, jalur evakuasi jelas, sistem komunikasi berjalan, dan masyarakat mampu bertahan dalam 24 jam pertama — periode paling kritis dalam sebuah bencana.

Di banyak daerah, kami melihat semangat gotong-royong yang luar biasa. Tugas negara adalah memperkuatnya, bukan membiarkannya bekerja sendirian.

Solidaritas Sebagai Tradisi Politik

Fraksi PKS memiliki satu tradisi yang mungkin kecil tetapi bermakna: memotong gaji anggota dewan setiap kali terjadi bencana besar. Dana itu disalurkan langsung ke masyarakat yang terdampak. Ini bukan pengganti kebijakan, tetapi simbol bahwa kami tidak ingin menjadi politisi yang hanya berbicara dari podium. Kami ingin hadir — secara politik, legislasi, dan kemanusiaan.

Penutup: Politik yang Menjaga Nyawa

Saya selalu percaya: bencana bukan hanya ujian bagi negara, tetapi ujian bagi martabat politik. Politik yang tidak melindungi rakyatnya bukan politik yang layak dipertahankan. Legislasi yang tidak menjaga nyawa adalah legislasi yang kehilangan jiwanya.

Di Fraksi PKS DPR RI, kami memilih untuk berada di garis yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu benar: garis yang menjaga kehidupan.

Karena pada akhirnya, bangsa ini bukan hanya membutuhkan pembangunan, tetapi perlindungan. Bukan hanya infrastruktur, tetapi keselamatan. Bukan hanya pertumbuhan, tetapi ketangguhan.

Dan tugas kami sebagai Anggota DPR di Pusat maupun Derah adalah memastikan negara tidak pernah absen dalam menghadapi setiap ancaman yang menghampiri. Mohon terus dukung don koreksi kami

SEKJEN DPP PKS **H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.**

Menguatkan Respons, Menegakkan Akuntabilitas:

Bencana sebagai Ujian Sistem dan Kepemimpinan

Dalam beberapa tahun terakhir, negeri ini seperti dipaksa bercermin melalui serangkaian bencana ekologis: banjir besar, longsor, banjir bandang, hingga kerusakan infrastruktur yang meluas. Setiap bencana datang membawa luka, tetapi juga pesan yang tidak boleh kita abaikan. Bencana bukan hanya peristiwa alam; ia adalah stress test terhadap kesiapan negara, kedisiplinan tata kelola, dan kepekaan sosial seluruh elemen bangsa—termasuk struktur dan kader Partai Keadilan Sejahtera.



Di tengah kepedihan para penyintas, kita justru belajar satu hal yang tegas: bencana adalah ujian sistem, bukan sekadar ujian cuaca. Ia menguji apakah kebijakan publik telah berjalan dengan akuntabel; apakah negara hadir secara cepat, tepat, dan manusiawi; apakah masyarakat sipil bergerak saling menguatkan; dan apakah struktur politik kita mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton.

Manajemen Krisis: Ketika Detik-detik Pertama Menentukan Nyawa

Dalam ilmu manajemen krisis, ada satu prinsip yang tidak pernah berubah: respons awal menentukan skala kerusakan. Karena itu, setiap bencana membutuhkan tiga hal secara simultan—kecepatan, ketepatan, dan koordinasi.

Ketika jembatan putus, listrik padam, dan jaringan komunikasi lumpuh, publik tidak menunggu teori; mereka menunggu tindakan. Di sinilah peran kader dan struktur PKS diuji. Kita bukan hanya hadir untuk mengirim bantuan, tetapi untuk menunjukkan bahwa politik bisa menjadi ruang kemanusiaan yang konkret: menguatkan posko, menggerakkan relawan, mengedukasi publik, serta memastikan pemerintah daerah dan nasional memegang kompas kebijakan yang benar.

Sikap cepat tanggap bukan semata kemampuan logistik, tetapi cermin budaya organisasi kita: kompak, disiplin, bergerak dalam satu komando, dan meletakkan kemaslahatan umat sebagai prioritas.

Kesiapan Struktur dan Kader: Dari Empati ke Sistem Aksi

PKS memiliki tradisi panjang hadir di titik-titik bencana. Namun dunia telah berubah; skala bencana semakin besar, dan tuntutan publik semakin tinggi. Karena itu, kesiapan struktur tidak cukup hanya mengandalkan semangat, tetapi membutuhkan:

- pemetaan risiko berbasis data,
- prosedur baku tanggap darurat,
- pelatihan rutin bagi kader dan simpatisan,
- koordinasi sigap dengan pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan,
- serta kemampuan komunikasi krisis yang akurat dan bertanggung jawab.

> “Bencana bukan hanya peristiwa alam; ia adalah stress test terhadap kesiapan negara, kedisiplinan tata kelola, dan kepekaan sosial seluruh elemen bangsa—termasuk struktur dan kader Partai Keadilan Sejahtera.”



Di era digital, kecepatan informasi dapat menyelamatkan atau membingungkan. Maka kader kita harus menjadi penjernih, bukan bagian dari kegaduhan. Kecerdasan berkomunikasi adalah bagian dari ibadah sosial kita—menyampaikan fakta, memberi arahan, dan menenangkan publik.

Akuntabilitas Kebijakan Publik: Pondasi Negara yang Kuat

Bencana selalu mengungkapkan akar masalah yang lebih dalam: perizinan yang lemah, tata kelola yang longgar, korupsi lingkungan, dan rendahnya transparansi. Ketika banjir besar terjadi, publik tidak hanya bertanya berapa tinggi air, tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya hutan. Ketika longsor menelan rumah-rumah, publik bertanya mengapa izin tambang bisa muncul tanpa pengawasan.

Inilah saat di mana politik memperoleh makna tertingginya: menegakkan akuntabilitas kebijakan publik. Negara harus hadir bukan hanya saat mengeringkan lumpur, tetapi saat memastikan sistem perizinan berjalan jujur; saat memperkuat pengawasan lingkungan; saat mengutamakan keselamatan warga di atas kepentingan ekonomi sesaat.

PKS berkewajiban mengawal hal ini secara konsisten. Di parlemen, di daerah, maupun di ruang publik, kita membawa satu pesan: kebijakan yang merusak alam adalah kebijakan yang merusak manusia.

Sinergi: Ketika Bencana Menjadi Momentum Perubahan

Majalah Sinergi edisi ini memotret rangkaian peristiwa bencana dari perspektif yang lebih luas: bukan hanya kisah korban, tetapi juga kisah sistem; bukan hanya laporan kerusakan, tetapi pelajaran strategis untuk negeri.

Melalui edisi ini, saya mengajak seluruh struktur dan kader PKS menjadikan bencana sebagai:

"Dalam ilmu manajemen krisis, ada satu prinsip yang tidak pernah berubah: respons awal menentukan skala kerusakan. Karena itu, setiap bencana membutuhkan tiga hal secara simultan—kecepatan, ketepatan, dan koordinasi."

- pengingat bahwa kepemimpinan menuntut kesiapan setiap saat,
- tantangan untuk memperbaiki manajemen respons kita,
- komitmen untuk terus menegakkan akuntabilitas publik,
- dan momentum memperkuat jejaring kemanusiaan di seluruh Indonesia.

Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa menghentikan kelalaian. Kita tidak bisa menahan gempa, tetapi kita bisa menegakkan tata kelola yang kuat. Kita tidak bisa menghapus risiko sepenuhnya, tetapi kita bisa membangun struktur organisasi dan negara yang lebih tangguh dan berdaya.

Bencana menguji kita.
Tetapi ia juga mendewasakan kita.

Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi amal kebajikan, memperkuat masyarakat, dan meneguhkan PKS sebagai rumah perjuangan yang selalu hadir untuk rakyat—di hari baik, maupun di hari paling genting.

Hormat saya,
H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.
Sekretaris Jenderal DPP
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ketua Satgas Tanggap
Bencana Nasional DPP PKS

PRESIDEN PKS Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

Solidaritas di Tengah Luka Negeri

Gerak cepat itu adalah cermin dari ruh perjuangan yang kita yakini bersama: bahwa politik harus berpihak pada kehidupan

Hujan yang mengguyur tanpa henti kembali membuka babak berat bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sungai-sungai meluap, tebing-tebing runtuh, jalanan terputus, rumah hanyut, dan ribuan warga harus mengungsi dalam kepanikan yang tak sempat disiapkan. Di tengah kesibukan evakuasi, suara tangis anak-anak bersahut dengan gemuruh air bah; dan para orang tua hanya bisa menggenggam sisa pakaian sambil memandangi hidup yang seketika berubah.

Sebagai bangsa yang hidup di tanah yang dianugerahi keindahan sekaligus kerentanan, kita kembali diuji. Tapi sejarah Indonesia selalu mencatat hal yang sama: di saat luka menganga, solidaritas rakyat bangkit dengan kekuatan yang tak pernah habis.

Sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera, saya merasakan kedukaan itu bukan dari laporan yang masuk ke meja kerja, tetapi dari wajah-wajah yang saya temui di lapangan, dari relawan yang kembali dalam keadaan kelelahan, dari foto-foto anak yang kehilangan rumahnya. Di momen seperti inilah,



amanah kepemimpinan dan komitmen politik menemukan maknanya yang paling jernih.

Bencana yang Menguji, Solidaritas yang Menjawab

Saya menyaksikan sendiri bagaimana kader dan pejabat publik PKS di berbagai daerah langsung bergerak tanpa menunggu komando: membuka dapur umum, mengangkat jenazah warga, menyuplai logistik, bahkan menggendong lansia melewati derasnya arus banjir. Banyak dari mereka datang dari daerah jauh, memakai dana sendiri, hanya karena satu alasan: kemanusiaan memanggil.

Gerak cepat itu adalah cermin dari ruh perjuangan yang kita yakini bersama: bahwa politik harus berpihak pada kehidupan.

Namun, skala bencana kali ini sangat besar. Kebutuhan begitu banyak. Luka sangat dalam. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan gerakan ini mengalir tanpa arah dan komando. Kita perlu memperkuatnya, menyatukannya, dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dari kesadaran inilah Instruksi Mobilisasi Nasional diterbitkan.

SATGAS Kemanusiaan PKS: Mengikat Gerak Menjadi Kekuatan Nasional

Saya menugaskan SATGAS Siaga Bencana DPP PKS, di bawah koordinasi Sekjen, untuk memimpin gerakan ini secara nasional. Mereka bertanggung jawab mengoordinasikan pendataan korban, pengerahan relawan, dan distribusi bantuan bersama Fraksi PKS DPR RI, BPPJ, BPPW, BKBN, KOMDIGI, dan seluruh DPW Indonesia.

Dalam situasi bencana, data adalah nyawa kedua. Tanpa pendataan yang benar, bantuan bisa salah sasaran; relawan bisa kewalahan; dan titik rawan pengungsian bisa terlewat. Karena itu, SATGAS menjadi pusat komando yang menjaga agar gerakan solidaritas ini tidak hanya besar, tetapi juga tepat dan bertanggung jawab.

Kader PKS: Jantung Kemanusiaan yang Tak Pernah Padam

Dalam instruksi ini, saya menyerukan kepada seluruh kader: bantu dengan apa pun yang ada di tangan Anda.

Tidak ada kontribusi yang terlalu kecil: setoples biskuit, selimut, sepasang pakaian layak pakai, uang hasil patungan keluarga, atau sekadar tenaga untuk mengatur logistik.

Bantuan-bantuan itu dikumpulkan melalui DPW masing-masing, agar proses distribusinya rapi, cepat, dan terdokumentasi. Dalam banyak bencana sebelumnya, kader PKS kerap menjadi pihak pertama yang tiba—mengangkat perahu karet bersama warga, memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan,

Gerakan kemanusiaan PKS bukanlah sekadar respons cepat; ia adalah komitmen jangka panjang—komitmen untuk berada bersama rakyat hingga mereka dapat berdiri kembali

hingga mendirikan posko pengungsian sebelum listrik kembali menyala.

Gerakan itu tak boleh berhenti.
Ia adalah identitas kita.
DPW Seluruh Indonesia: Penyangga Rantai Penyelamatan

DPW yang tidak terdampak bencana saya minta untuk: Menggalang bantuan secara lokal, Menyiapkan relawan yang siap diberangkatkan kapan saja, dan berkoordinasi langsung dengan DPW Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Saat daerah terdampak sibuk menyelamatkan warga, DPW lain menjadi tulang rusuk yang menopang. Tanpa mereka, pasokan logistik akan tersendat dan relawan akan bekerja tanpa ritme. Kita ingin memastikan bahwa warga di titik paling terpencil sekalipun tidak merasa sendirian.



Pejabat Publik PKS: Keteladanan Politik dalam Masa Krisis

Kepada para pejabat publik PKS—anggota DPR RI, DPRD, serta para kepala daerah—saya menginstruksikan tiga hal:

1 **Pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan.**

Ini bukan sekadar mekanisme adminis-trasi; ini adalah pesan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib berpihak pada rakyat dalam keadaan paling sulit.

2 **Mengoptimalkan fungsi anggaran dan pengawasan.**

Pastikan setiap rupiah bantuan pemerintah—baik pusat maupun daerah—mengalir cepat, tepat, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi.

3 **Koordinasi intensif lintas lembaga.**

Penanganan bencana tidak mengenal sekat instansi. Pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, relawan, semuanya harus bergerak sebagai satu tubuh.

Itulah standar kepemimpinan yang ingin kita tegakkan.

Kepemimpinan yang tidak hanya hadir dalam rapat, tetapi hadir di tengah lumpur.

Prinsip-Prinsip Moral yang Menjadi Kompas Gerakan Kita

Agar kerja kemanusiaan ini tidak kehilangan arah, saya menegaskan lima prinsip utama:

- Keikhlasan dan profesionalitas
- Respons cepat dan tepat
- Keselamatan relawan sebagai prioritas
- Kolaborasi lintas lembaga
- Akuntabilitas publik dan transparansi

Di tengah bencana, niat baik harus bertemu dengan tata kelola yang baik. Kita ingin gerakan ini bersih, ter-ukur, dan dapat dipertanggungjawab-kan kepada publik maupun kepada Allah SWT.

"Kader dan pejabat publik PKS di berbagai daerah langsung berge-rak tanpa menunggu komando. Banyak dari mereka datang dari daerah jauh, memakai dana sendiri, hanya ka-rena satu alasan: kema-nusiaan memanggil."



Di Atas Penderitaan, Mari Kita Tegakkan Harapan

Tidak ada bangsa yang benar-benar siap menghadapi bencana sebesar ini. Tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang memilih untuk tetap saling menjaga, saling menopang, dan saling menguatkan.

Gerakan kemanusiaan PKS bukanlah sekadar respons cepat; ia adalah komitmen jangka panjang—komitmen untuk berada bersama rakyat hingga mereka dapat berdiri kembali di tanah mereka sendiri, membangun hidup yang sempat runtuh, dan menata masa depan yang sempat goyah.

Saya menyerukan kepada seluruh kader, relawan, dan pejabat publik:

Mari kita satukan langkah.
Mari kita jaga saudara-saudara kita.
Mari kita pastikan tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan.

Semoga Allah Swt. melindungi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta membalas seluruh ikhtiar kita dengan kebaikan yang berlipat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

KETUA DSP PKS KH. Dr. Muslih Abdul Karim, M.A.

Menjaga Saudara, Menegakkan Amanah

Arahan Syariah tentang Solidaritas di Tengah Bencana

Hujan yang mengguyur Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada penghujung tahun 2025 menghadirkan luka kolektif bagi bangsa ini. Ribuan warga kehilangan rumah, akses terputus, dan malam-malam yang biasanya tenang berubah menjadi malam ketakutan. Di tengah kabar duka itu, kita kembali tertegun oleh firman Allah Swt. yang menjadi suluh bagi kaum beriman:



وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Ayat ini bukan sekadar perintah. Ia adalah panggilan jiwa—panggilan untuk bangkit, bergerak, dan membuktikan bahwa iman tidak berhenti di lisan, tetapi menjelma dalam amal.

Bencana sebagai Ayat Kehidupan

Dalam syariah Islam, alam adalah ayat—tanda yang mengajari manusia tentang kebesaran Allah dan kelemahan dirinya. Bencana yang melanda Sumatra hari ini menegaskan dua hal sekaligus: betapa rapuhnya kita, dan betapa besarnya amanah yang kita pikul sebagai khalifah di bumi.

Rasulullah Saw. menggambarkan solidaritas umat dengan begitu indah:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ
وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ
سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh—jika satu anggota sakit, seluruh tubuh turut merasa panas dan demam." (— HR. Bukhari dan Muslim)

Jika hati kita tergetar melihat saudara-saudara kita mengungsi dalam dingin malam, itu pertanda iman bekerja. Akan tetapi, syariah selalu menuntut lebih dari rasa: ia menuntut tindakan.

Platform PKS memaknai politik sebagai pelayanan, dan pelayanan sebagai ibadah sosial. Maka, ketika musibah datang, seluruh kader dan pejabat publik PKS dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh besar umat yang merasakan sakit bersama dan berusaha menyembuhkannya.

Keadilan Ekologis dan Amanah Memakmurkan Bumi

Tidak dapat dipungkiri, banyak bencana hari ini muncul karena ketidakharmonisan manusia dengan alam. Syariah memperingatkan kita:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا

"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."(QS. Al-A'rāf [7]: 56

Ayat ini mengikat kita pada etika pembangunan.

Tata ruang yang dilanggar, daerah aliran sungai yang dipersempit, lereng yang dieksploitasi—semuanya adalah bentuk fasād (kerusakan) yang syariah minta untuk dihentikan.

Penanganan bencana tidak boleh hanya reaktif.

Ia harus holistik—membenahi akar, memperkuat mitigasi, dan memastikan kebijakan publik berjalan sejalan dengan wahyu dan sains.

"Penanganan bencana bagi seorang pemimpin bukan sekadar prosedur administratif, tetapi hifzhun-nafs—penjagaan jiwa—salah satu tujuan besar maqashid al-syari'ah."



Relawan: Wajah Rahmat Islam di Lapangan

Saya menyaksikan bagaimana relawan PKS datang dari berbagai daerah: membawa logistik, menggendong anak-anak, menuntun lansia, membuka dapur umum, bahkan menjadi penyambung nyawa ketika akses terputus.

Mereka adalah manifestasi dari hadis Nabi:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad)

Relawan bukan sekadar orang yang bekerja; mereka adalah orang yang menghadirkan rahmat Allah kepada manusia lain.

Kepada seluruh kader PKS, khusunya Para Pejabat Publik saya tegaskan: **jadilah manfaat di mana pun bencana hadir.**

Inilah identitas kita, dan inilah bentuk ibadah yang tidak berhenti meski masjid-masjid terendam banjir.

Tanggung Jawab Syariah Bagi Pejabat Publik

Para pejabat publik PKS memiliki amanah ganda: amanah politik dan

amanah syariah.

Penanganan bencana bagi seorang pemimpin bukan sekadar prosedur administratif, tetapi hifzhun-nafs—penjagaan jiwa—salah satu tujuan besar maqāshid al-syarī'ah. Setiap keputusan anggaran, setiap instruksi lapangan, setiap koordinasi lintas lembaga adalah bagian dari ibadah yang akan ditanya di hadapan Allah kelak.

Karena itu, saya menyerukan:

- percepat respons,
- pastikan transparansi,
- jaga keselamatan relawan,
- dan pastikan tidak ada satu pun warga terdampak yang merasa ditinggalkan.

Pemimpin dalam Islam bukan orang yang berada di depan umat dengan kekuasaan, tetapi orang yang masuk paling dulu ke medan kesulitan umat.

Allah Swt. menegaskan dengan sangat menghibur:

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٦

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Asy-Syarh [94]: 6

Ayat ini mengajarkan bahwa tugas kita adalah menjadi bagian dari yusr—kemudahan—itu. Kita tidak mungkin mencegah hujan turun atau tanah bergerak, tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap warga yang terdampak bencana merasakan kehadiran saudara-saudaranya.

> Jika hati kita tergetar melihat saudara-saudara kita mengungsi dalam dingin malam, itu pertanda iman bekerja. Akan tetapi, syariah selalu menuntut lebih dari rasa: ia menuntut tindakan

Solidaritas adalah ibadah.
Kepedulian adalah perintah syariah.
Dan bergerak untuk menyelamatkan sesama adalah jalan menuju kemuliaan.

Semoga Allah Swt. menguatkan saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta menjadikan setiap tetes tenaga dan bantuan yang kita berikan sebagai amal yang diterima dan menghapuskan dosa-dosa kita.

KH. Dr. Muslih Abdul Karim, M.A.
Ketua Dewan Syariah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

MPP PKS Dr. Hermanto, S.E., M.M

Menjaga Indonesia Di Titik Rapuh:

Arah Kemanusiaan dan Kepemimpinan

Hujan yang turun tanpa jeda di penghujung 2025 kembali menyentakkan kesadaran kita. Banjir bandang di Sumatra, longsor yang meruntuhkan lereng-lereng tua, serta ribuan warga yang harus mengungsi di tengah gelapnya malam—semuanya menegaskan satu hal: Indonesia adalah negeri indah yang selalu hidup di antara dua tebing, tebing karunia dan tebing kehancuran.



Sebagai bangsa, kita telah lama mengetahui bahwa garis patahan, gunung api, dan siklus hujan adalah bagian dari identitas geografis kita. Namun bencana tidak pernah benar-benar menjadi "kabar biasa". la selalu menghadirkan kepedihan baru, kehilangan yang tidak bisa dihitung oleh statistik, dan sekaligus pertanyaan yang tak henti mengusik nurani: apa makna kepemimpinan ketika rakyat sedang menderita?

Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, saya melihat bahwa situasi bencana hari ini tidak hanya menuntut respons cepat, tetapi refleksi yang dalam tentang peran politik, negara, dan manusia dalam lanskap krisis yang terus berubah. Panduan kita ada pada Platform PKS: menjadi kekuatan politik yang memuliakan manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga kelestarian ciptaan.

Bencana sebagai Ayat Kehidupan

Dalam tradisi intelektual Islam, alam selalu dipahami sebagai ayat—tanda. Bencana bukan sekadar peristiwa

geologis atau hidrometeorologis; ia adalah cermin yang mengembalikan tatapan kita kepada kelemahan diri dan kekeliruan kolektif.

Ketika banjir menggenangi nagari-nagari di Sumatra atau longsor memutus jalan di daerah pegunungan, kita tidak hanya menyaksikan fenomena alam, tetapi juga hasil dari pilihan kebijakan yang sering mengkhianati prinsip keberlanjutan. Hutan yang hilang, tata ruang yang dilanggar, sungai yang disempitkan—semua itu menegaskan bahwa bencana bukan melulu "takdir", melainkan efek dari perilaku manusia yang menjauh dari hikmah pengelolaan bumi.

Platform PKS meletakkan landasan bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan ciptaan. Karena itu, dalam setiap bencana kita harus bertanya:

Sejauh apa bangsa ini hidup sesuai nilai yang dijanjikannya?

Negara Harus Hadir Sebagai Penjaga Kehidupan, Bukan Penunda Tindakan

Salah satu prinsip utama di dalam Platform PKS adalah terbangunnya negara yang kuat namun melayani. Bencana adalah ujian paling telanjang bagi prinsip ini. Negara tidak boleh datang terlambat, gamang, atau menunggu tekanan publik. Negara harus hadir sebelum penderitaan membesar, membantu sebelum korban kehilangan harapan.

Kita memerlukan:

- Tata kelola risiko yang disiplin,

"Bencana tidak pernah benar-benar menjadi 'kabar biasa'. Ia selalu menghadirkan kepedihan baru, kehilangan yang tidak bisa dihitung oleh statistik, dan sekaligus pertanyaan yang tak henti mengusik nurani: apa makna kepemimpinan ketika rakyat sedang menderita?"

- Penegakan hukum tata ruang yang tidak kompromistis,
- Mitigasi yang bukan hanya retorika tahunan,
- Serta koordinasi lintas lembaga yang tidak terhambat ego sektoral.

Ketika bencana di Sumatra berulang, dan pemerintah daerah kewalahan, rakyat melihat siapa yang benar-benar berlari paling dulu. Dalam situasi seperti ini, pejabat publik PKS harus mengambil sikap moral dan administrasi yang jelas: hadir, bekerja cepat, dan mendesak kebijakan nasional bergerak lebih berani.

Solidaritas sebagai Jantung Gerakan PKS

Sejak awal berdirinya, PKS mengembangkan tradisi kader yang sigap bergerak. Dalam beberapa pekan terakhir, saya melihat relawan PKS di Padang, Aceh Singkil, dan sejumlah daerah lain bekerja tanpa jeda—mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan, menghidupkan dapur umum, dan memulihkan ruang-ruang ibadah yang terendam.

Kesiapsiagaan ini bukan instruksi politik semata, tetapi buah dari ideologi yang menempatkan pelayanan manusia sebagai kemuliaan tertinggi. Kita percaya bahwa kekuasaan hanyalah sarana untuk menjaga kehidupan; kemanusiaan adalah orientasi sejati perjuangan.

Karena itu, saya menyerukan agar setiap kader, struktur, dan pejabat publik PKS menjadikan kerja-kerja kemanusiaan ini sebagai bagian dari ibadah sosial. Respons cepat harus



berpadu dengan profesionalitas dan akuntabilitas. Semangat harus menyatu dengan ketepatan. Dan empati harus diiringi strategi jangka panjang.

Bencana Tidak Boleh Ditangani Secara Reaktif

Salah satu kekeliruan terbesar negeri ini adalah menganggap bencana sebagai peristiwa musiman yang dihadapi dengan pasokan tenda, beras, dan obat-obatan. Padahal bencana adalah gejala dari persoalan yang jauh lebih dalam: konsekuensi dari kegagalan menjaga ekosistem dan menata ruang hidup secara benar.

PKS berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh menempatkan manusia sebagai pusat satu-satunya. Alam adalah amanah. Ekosistem adalah wasiat. Dan generasi masa depan memiliki hak atas bumi yang layak dihuni.

> Pembangunan tidak boleh menempatkan manusia sebagai pusat satu-satunya. Alam adalah amanah. Ekosistem adalah wasiat."

Karena itu, penanganan bencana harus diperluas:

1. Menguatkan mitigasi berbasis sains, bukan kepentingan politik sesaat.
2. Mengokohkan kapasitas BPBD, nagari/desa, dan relawan sebagai garda terdepan.
3. Melakukan reforestasi dan rekonstruksi ekologis di wilayah rawan.
4. Mereformasi tata ruang dengan keberanian moral.

Tanpa itu semua, kita hanya akan terus menangani luka tanpa menyembuhkan penyakit.

Kepemimpinan yang Merenung dan Bergerak

Sebagai Ketua MPP PKS, tugas saya adalah mengingatkan bahwa politik selalu dimulai dari kesadaran moral. Bencana adalah panggung yang memperjelas siapa yang memimpin dengan hati, dan siapa yang hanya memimpin dengan jabatan.

Kepemimpinan hari ini menuntut dua hal sekaligus:

- **Renungan filosofis,** agar kita memahami akar persoalan;
- **Gerak cepat administratif,** agar rakyat tidak menunggu harapan yang tak kunjung tiba.

Kader dan pejabat publik PKS harus menjadi teladan dari dua hal ini:
berpikir jauh, bertindak dekat; memahami luas, menolong cepat.

Penutup: Dari Bencana Kita Belajar Menjadi Bangsa Penjaga Amanah

Bencana yang melanda negeri ini adalah pengingat yang tidak pernah usang: bahwa manusia adalah makhluk yang diberi kekuasaan bukan untuk menguasai bumi, tetapi untuk memakmurkannya.

Platform dan ideologi PKS menempatkan tiga nilai utama sebagai fondasi:

- Keadilan, agar tidak ada kelompok yang menanggung risiko lebih besar karena kelalaian struktural.
- Kesalingan, agar derita satu daerah menjadi panggilan seluruh bangsa.
- Kemanusiaan, agar setiap keputusan politik selalu berpihak pada kehidupan.

Saya berdoa semoga Allah Swt. menguatkan saudara-saudara kita yang terdampak, menguatkan para relawan yang bekerja siang malam, dan membimbing para pemimpin negeri untuk mengambil kebijakan yang berani dan bijaksana.

Bencana memang membuka luka, tetapi dari luka itulah bangsa sering menemukan arah baru. Mari kita jawab ujian ini dengan keikhlasan, kecerdasan, dan persatuan.



Dr. Hermanto, S.E., M.M
Komlsi Sumberdaya Manusia
Organisasi dan Kelembagaan
MPP PKS

KETUA MAJELIS SYURA PKS **Mohamad Sohibul Iman, Ph. D**

Membaca Ulang
Kepemimpinan, Kemanusiaan, dan Amanah Kita

Amanah yang kita emban bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi janji ruhani

Hujan yang turun berhari-hari di Sumatra akhir November hingga Desember 2025 bukan hanya memecah kesunyian malam, tetapi juga memecah kehidupan banyak keluarga. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Padang, Aceh Singkil, dan wilayah lain meninggalkan jejak pilu—rumah hilang, jalan terputus, dan air mata yang tak mudah dikeringkan. Dalam setiap bencana, kita seperti mendengar kembali bisikan lama dari sejarah Nusantara: bahwa keindahan negeri ini selalu membawa risiko, dan bahwa manusia Indonesia ditakdirkan bukan hanya untuk tinggal di tanah ini, tetapi merawatnya.

Dalam pekan-pekan itu, saya menyaksikan para relawan PKS yang bekerja tanpa jeda. Mereka mengangkat batu, memikul karung, menyeberangi arus deras untuk mengantar selimut atau sekadar memeluk warga yang kehilangan segalanya. Saya melihat pejabat publik PKS turun langsung ke lokasi, mengetuk pintu rumah- rumah yang tak



lagi sempurna berdiri, memastikan bahwa negara tidak absen dalam momen-momen rapuh itu.

Di tengah situasi seperti itulah saya merenungkan kembali makna kepemimpinan—bahwa kekuasaan yang tidak dipakai untuk hadir di tengah derita rakyat hanyalah kursi kosong yang terisi tubuh, bukan ruh.

Bencana dan Sebuah Pertanyaan Lama: Untuk Apa Kita Berkuasa?

Bencana selalu membawa dua pesan:

Yang pertama—pesan alam, bahwa manusia tak pernah sepenuhnya berkuasa.

Yang kedua—pesan moral, bahwa manusia diuji untuk saling menguatkan.

Setiap kali saya berdiri di depan para penyintas, saya melihat benang-benang halus yang menghubungkan kita: bahwa penderitaan satu orang adalah undangan bagi yang lain untuk hadir. Dan karena itu, saya kembali mengingatkan diri sendiri dan seluruh pejabat publik PKS: amanah yang kita emban bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi janji ruhani.

Kekuasaan bukan tujuan; ia adalah alat.

Dan alat itu hanya bermakna jika dipakai untuk menjaga kehidupan.

Platform perjuangan PKS selalu menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi politik. Karena itu, ketika banjir melanda Sumatra, bagi kami tidak ada pilihan lain selain turun tangan—baik di garis kebijakan maupun di medan bantuan kemanusiaan.

Respons Cepat adalah Kepedulian; Ketepatan adalah Tanggung Jawab

Saya bersyukur melihat bagaimana struktur PKS—dari pusat hingga ranting—bergerak dengan cepat. Bahkan sebelum instruksi formal dikeluarkan, banyak kader telah menggalang dana, membuka posko, mengevakuasi warga, dan menghidupkan dapur umum.

Namun, respons cepat saja tidak cukup. Bencana tidak boleh ditangani sebagai rutinitas tahunan, atau momentum seremonial yang lewat dan



“Saatnya Menegakkan Negara yang Hadir, Bukan Negara yang Terkaget-kaget... Negara tidak boleh menjadi entitas yang selalu 'mengejar bencana'.”

hilang. Kita perlu perubahan yang lebih mendasar: cara bangsa ini membaca risiko.

Di Sumatra, seperti halnya di banyak wilayah Indonesia, kita menghadapi persoalan struktural: tata ruang yang tidak disiplin, kawasan rawan yang terus dieksploitasi, infrastruktur yang tidak adaptif, dan minimnya kesiapsiagaan masyarakat. Peringatan dini kita canggih, tetapi last mile-nya rapuh. Alatnya ada; manusianya belum sepenuhnya siap.

Karena itulah saya mendesak pemerintah agar melakukan penanganan bencana secara holistik—bukan sekadar menghitung jumlah tenda atau menurunkan bantuan logistik, tetapi membenahi akar persoalan yang menanti saat kamera telah berhenti merekam.

Saatnya Menegakkan Negara yang Hadir, Bukan Negara yang Terkaget-kaget

Dalam beberapa kesempatan, saya menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan *status bencana nasional* untuk kejadian luar biasa di Sumatra. Bukan untuk mencari sensasi politik, tetapi karena skala kerusakan, keterbatasan daerah, dan dampak jangka panjangnya sudah melampaui kemampuan administratif lokal.

Negara tidak boleh menjadi entitas yang selalu “mengejar bencana”. Ia harus menjadi entitas yang mengantisipasi bencana, menghadapi dengan tenang, dan memulihkan dengan bermartabat.

Ini sejalan dengan komitmen ideologis PKS: menghadirkan negara yang kuat tetapi melayani, tegas tetapi empatik, menghormati kehidupan dan martabat setiap warganya.

Solidaritas: Ruh Bangsa yang Tak Pernah Padam

Dalam perjalanan saya menemui para penyintas, saya menemukan sesuatu yang selalu menguatkan saya: gotong

royong itu masih hidup. Tetangga mengangkat tetangga, anak muda membantu lansia, masjid menjadi pos darurat, dan para relawan dari berbagai latar belakang bersatu tanpa menanyakan perbedaan.

Inilah Indonesia kita.
Indonesia yang membuat kita yakin bahwa bangsa ini tidak akan runtuh selama masih ada tangan-tangan yang bekerja tanpa pamrih.

Gerakan solidaritas kader dan relawan PKS adalah bagian dari denyut itu—denyut kemanusiaan yang tidak dibentuk oleh propaganda politik, tetapi oleh nurani.

Arah Ke Depan: Menjahit Luka, Membangun Ketangguhan
Sebagai Ketua Majelis Syura PKS, saya mengajak seluruh kader, pejabat publik, dan masyarakat untuk menjadikan bencana ini sebagai titik balik. Kita harus memulai fase baru Indonesia: fase yang menjadikan mitigasi sebagai pilar pembangunan, bukan pengganggu agenda pembangunan.

Negara harus hadir dengan tiga komitmen:
1. **Ketegasan dalam tata ruang** – pembangunan harus sejalan dengan sains, bukan bernegosiasi dengan risiko.
2. **Penguatan last mile** – desa, nagari, dan kelurahan harus menjadi pusat kesiapsiagaan, bukan objek belas kasihan.
3. **Investasi pada manusia** – relawan dan masyarakat harus mendapat pelatihan rutin, bukan hanya saat bencana terjadi.
4. Ketangguhan bukan dibangun dengan peralatan mahal; ia dibangun dengan kesadaran kolektif.

Penutup: Bencana Adalah Madrasah Keikhlasan
Pada akhirnya, setiap bencana adalah sekolah bagi kesadaran kita. Ia mengajarkan:
- bahwa kekuasaan harus melayani,
- bahwa kekuatan harus melindungi,
- bahwa manusia harus menguatkan sesamanya,
- dan bahwa politik, pada tingkat terdalamnya, adalah urusan memuliakan kehidupan.

Semoga Allah Swt. menguatkan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Semoga setiap bantuan yang kita berikan menjadi jembatan harapan.

Dan semoga para pemimpin negeri ini—di pusat maupun daerah—menjalankan amanahnya bukan sebagai rutinitas birokrasi, tetapi sebagai ibadah sosial yang menghidupkan peradaban.
Wallahu a'lam.

Mohamad Sohibul Iman, M.Sc., Ph. D.
Ketua Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera

Doa untuk INDONESIA

Duka dan prihatin menyelimuti Nusantara.
Untuk saudara-saudara kami di Sumatera dan seluruh daerah terdampak bencana di Indonesia, kami turut merasakan kepedihan ini.

Kepada para kader PKS dan struktur dihimbau untuk senantiasa berdoa, Membantu meringankan beban, dan bergerak menolong saudara kita yang tertimpa musibah.

Semoga bantuan dan doa kita menjadi kekuatan untuk mereka bangkit kembali.





Indonesia di Atas Gelagar Air

Membaca Peta Risiko 2025

Indonesia hanya perlu satu hal: keberanian untuk berubah secepat bencananya.

Di negeri yang musimnya kian tak mengenal dirinya sendiri, peja-bat publik dituntut lebih dari se-kadar hadir: mereka diminta membaca tanda-tanda yang bergerak di balik angka, peta, dan langit yang berubah.

Negeri yang Selalu Basah

Di suatu sore yang tidak sepenuhnya hujan namun juga tak sepenuhnya kemarau, Indonesia memasuki 2025 dengan langit yang menggantung rendah— seolah menyimpan berita yang belum ingin ia ceritakan. Awan tampak ragu, seperti negeri ini yang sedang belajar membaca dirinya di tengah ritme alam yang berubah terlalu cepat.

Bencana, yang dulu setia pada kalender musim, kini datang tanpa tatakrama. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelomban...

Ketika Langit Menulis Ulang Musim

Para ahli telah lama mengatakan bahwa cuaca bukan lagi teman lama yang bisa ditebak. Tahun 2025 ditandai fase iklim yang serba-takpasti, membuat prediksi musiman kehilangan taring. Sementara itu, dinamika atmosfer regional memainkan perangai yang kadang basah, kadang liar, memaksa pemerintah daerah bekerja dalam ruang ketidakpastian yang semakin lebar.

Fenomena "Kemarau Basah" menjadi salah satu tanda perubahan zaman. Musim hujan datang lebih awal dari biasanya, sementara kemarau tak lagi kering. Di beberapa wilayah, hujan turun hingga bulan-bulan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai masa jeda air. Akibatnya, waktu untuk memperbaiki drainase, memperdalam sungai, atau menguatkan bantaran sungai, hilang tertiup anomali yang kini menjadi normal baru.

Bencana hidrometeorologi tak lagi menunggu musim. la datang kapan saja, mengaburkan batas antara hari-hari aman dan hari-hari berbahaya. Kesiapsiagaan tak lagi bisa bersandar pada kalender.



Beban Struktural di Balik Angka

Di balik langit yang berubah, terdapat angka-angka yang menggelegar diam-diam. Kerugian ekonomi akibat bencana mencapai puluhan triliun setiap tahun, sementara kapasitas anggaran penanggulangan pemerintah hanya sepertiganya. Jurang pendanaan ini menciptakan luka yang tak sempat sembuh—setiap bencana besar meninggalkan pemulihan yang pincang, menggerus kualitas infrastruktur dan menambah kerentanan masyarakat.

Ketika bencana melanda pusat-pusat ekonomi, pukulannya semakin keras. Banjir besar yang pernah menghantam Jabodetabek misalnya, menghapus lebih dari satu triliun rupiah dalam waktu singkat. Kerugian semacam itu tidak hanya merobohkan rumah warga, tetapi juga menunda pembangunan yang telah dirancang bertahun-tahun.

Indonesia berdiri di atas perhitungan yang sulit: risiko bukan sekadar kejadian alam, tetapi beban struktural yang menyelimuti ekonomi nasional. Dan beban itu terus bertambah dari tahun ke tahun.





Timur Yang Rapuh, Barat Yang Mahal

Jika peta risiko 2025 dibentangkan, tampak dua wajah Indonesia yang sama-sama genting. Di bagian timur dan sebagian wilayah Sumatra serta Sulawesi, tingkat risiko bencana berada pada kategori tertinggi. Di kawasan ini, ancaman alam berpadu dengan kondisi sosial yang rumit: keterbatasan infrastruktur, kemiskinan yang lebih mengakar, serta wilayah geografis yang sulit dijangkau.

Namun wilayah yang menyimpan ancaman ekonomi terbesar justru berada di barat: Jawa, Bali, serta kota-kota besar di Sumatra. Secara indeks risiko, wilayah ini mungkin tampak "sedang", tetapi nilai aset yang terpancang di atasnya membuat setiap bencana menjadi kerugian nasional. Satu banjir di kawasan metropolitan dapat mengguncang rantai pasok, menghambat industri, dan menelan waktu pemulihan yang panjang.

Indonesia memiliki dua dunia:
– satu dunia yang retak karena rapuh,
– satu dunia yang retak karena mahal.

Dua-duanya membutuhkan perhatian yang sama mendesaknya, meski dengan pendekatan yang berbeda.



> Di kota, kemiskinan ada-lah nama lain bagi risiko. Mereka yang tinggal dalam kondisi minim infras-truktur adalah mereka yang pertama merasakan dampak badai...”

Kota-kota Yang Menjadi Ruang Risiko

Risiko tertinggi tak selalu lahir dari gunung yang bergolak atau sungai yang meluap, tetapi dari kota-kota yang tumbuh tanpa arah yang jelas. Urbanisasi yang tidak seimbang telah menciptakan ruang-ruang yang penuh bahaya: permukiman padat di bantaran sungai, rumah-rumah yang menempel di lereng curam, dan lorong-lorong sempit tempat keluarga miskin mencari hidup sambil menunggu bencana datang lagi.

Di kota, kemiskinan adalah nama lain bagi risiko. Mereka yang tinggal dalam kondisi minim infrastruktur adalah mereka yang pertama merasakan dampak badai: rumah terendam, akses makanan terputus, penyakit datang setelah banjir surut.

Lebak di Banten menjadi contoh yang sering disebut: frekuensi bencana hidrometeorologi di sana sangat tinggi, dari banjir hingga angin kencang. Topografinya pegunungan, lingkung-annya terdegradasi, drainasenya minim. Ia adalah miniatur masalah besar negeri ini: kombinasi alam, sosial, dan tata kelola yang saling memperkuat kerentanan.

Gambar Besar Risiko 2020–2024

Empat tahun terakhir menunjukkan intensitas bencana yang tak kunjung mereda. Lebih dari dua ribu kejadian tercatat dalam satu tahun, dengan ratusan korban jiwa. Angka-angka ini bukan lagi tanda alam yang marah sesekali, melainkan ritme baru yang harus dipahami sebagai pola.

Dalam periode yang sama, tiga gambaran utama muncul:

Pertama, bencana hidrometeorologi mendominasi hampir seluruh kejadian, menegaskan bahwa air telah menjadi aktor utama.

Kedua, kerugian ekonomi paling besar muncul dari kota-kota padat, menunjukkan rapuhnya jalur logistik dan infrastruktur urban.

Ketiga, negara menghadapi defisit pemulihan kronis—jatuhnya satu jembatan atau rusaknya satu bendungan tak bisa dikejar dengan kecepatan anggaran yang tersedia.



Dalam wajah data yang keras ini, Indonesia seperti berlari dalam hujan lebat sambil membawa beban yang tak pernah kering.

> Sistem drainase yang tak diperbarui selama puluhan tahun menjadi titik lemah. Jalan raya hingga bandara tak jarang harus berhenti beroperasi, menunjukkan betapa rapuhnya fondasi logistik negeri ini



Peta Risiko & Hotspot: Wajah Geografis Kerentanan

Peta lingkungan 2025 menunjukkan bahwa tak satu pun provinsi Indonesia tergolong berisiko rendah. Risiko tinggi terkonsentrasi di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, serta titik-titik intens di Sumatra dan Sulawesi. Daerah-daerah ini menanggung beban alam yang berat, diperparah oleh terbatasnya kapasitas mitigasi.

Bencana hidrometeorologi kerap memukul Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sisi lain, ancaman gempa terus membayangi kawasan sesar aktif seperti Sesar Lembang di Jawa Barat, sementara wilayah timur Indonesia menyimpan potensi gempa merusak yang sulit diprediksi.

Untuk karhutla, Sumatra dan Kalimantan tetap menjadi episentrum. Meski upaya pemadaman udara semakin masif dari tahun ke tahun, akar masalahnya tetap sama: kerusakan lahan gambut dan tata kelola lahan yang tak kunjung tuntas.

Peta risiko menunjukkan bukan hanya titik bencana, tetapi kesenjangan kapasitas penanganan.

Dampak Multisektor: Pangan, Infrastruktur, Dan Kesehatan



Pangan. Tantangan terbesar tahun 2025 bukan kekeringan, tetapi kelebihan air. Genangan di lahan pertanian membuat masa tanam kacau, panen tertunda, dan risiko gagal tanam meningkat. Produksi padi bergantung pada hujan yang tak lagi mengenal pakem. Di tengah situasi ini, literasi iklim melalui Sekolah Lapang Iklim menjadi ruang belajar penting bagi petani untuk memahami pola yang tak lagi musiman.

Infrastruktur. Hujan intensitas tinggi memutus jalur transportasi, melumpuhkan mobilitas, dan mengancam pasokan kota-kota besar. Sistem drainase yang tak diperbarui selama puluhan tahun menjadi titik lemah. Jalan raya hingga bandara tak jarang harus berhenti beroperasi, menunjukkan betapa rapuhnya fondasi logistik negeri ini.

Kesehatan & Tata Kelola. Setelah banjir surut, masalah lain muncul: penyakit, kekurangan air bersih, dan penurunan kualitas gizi. Di banyak daerah, bencana memicu krisis sanitasi, sementara ketahanan pangan yang sudah lemah menjadi makin goyah. Tantangan ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial yang menuntut kebijakan yang lebih dalam dari sekadar respons darurat.

Rekomendasi & Epilog: Risiko Sebagai Bahasa Baru Pembangunan

Laporan risiko 2025 menyodorkan serangkaian amanat kebijakan: stabilisasi fiskal melalui pendanaan bencana yang berkelanjutan, integrasi data iklim dalam perencanaan pangan, pengendalian tata ruang, penguatan logistik, proteksi aset strategis, dan sistem peringatan dini multi-bahaya. Namun yang terpenting adalah satu hal: mengubah cara kita membaca risiko.

Risiko harus menjadi filter pertama dalam pembangunan. Setiap bendungan, jalan, kawasan permukiman, dan proyek investasi harus melewati uji risiko sejak tahap perencanaan. Di masa perubahan iklim, pertanyaan paling penting bukan lagi "apa yang ingin dibangun?", tetapi "apa yang mampu bertahan?".

Epilog

Membaca peta risiko Indonesia 2025 adalah membaca masa depan. Dalam masa depan itu, langit mungkin tak lagi memberi banyak kepastian, tetapi ia memberi isyarat yang cukup untuk dipahami. Indonesia hanya perlu satu hal: keberanian untuk berubah secepat bencananya. Dari keberanian itu, lahirlah ketahanan. Dan dari ketahanan, terbentuklah masa depan yang tetap bisa ditinggali.





Menjaga Amanah Di Era Risiko

Manifesto Singkat untuk Kepala Daerah PKS

Gagasan Besar: Politik Ketangguhan, Bukan Politik Keributan

Indonesia tengah berjalan dalam zaman ketika alam bergerak lebih cepat daripada birokrasi, dan risiko tumbuh lebih cepat daripada keputusan. Di tengah situasi seperti itu, kepemimpinan politik tidak boleh lagi sibuk pada agenda kecil yang hanya menyenangkan publik sesaat. Ada amanah yang jauh lebih besar: *menjaga kehidupan warganya dalam

Kepala daerah PKS membawa identitas politik yang tidak lahir dari transaksi, tetapi dari nilai: pelayanan, keadilan, amanah, keberpihakan pada rakyat kecil, dan keberanian menjaga lingkungan

musim yang tak lagi stabil*.

Di sinilah perbedaan antara politisi biasa dan pemimpin rakyat. Politisi menunggu masalah untuk tampil; pemimpin membaca tanda-tanda bahkan ketika semuanya masih tampak tenang.

Kepala daerah PKS membawa identitas politik yang tidak lahir dari transaksi, tetapi dari nilai: pelayanan, keadilan, amanah, keberpihakan pada rakyat kecil, dan keberanian menjaga lingkungan. Nilai-nilai ini bukan sekadar slogan kampanye, melainkan fondasi moral yang hari ini menjadi lebih relevan daripada sebelumnya.

Sebab bencana bukan hanya persoalan alam; ia adalah cermin tata kelola, kualitas tata ruang, keberpihakan anggaran, dan integritas kebijakan. Dalam banyak kasus, bencana adalah hasil dari keputusan politik yang tertunda.

Maka di era ini, kepala daerah PKS dituntut membawa politik ke level yang lebih tinggi: *politik ketangguhan*, politik yang bekerja sebelum bencana datang, bukan setelahnya. Politik yang mengutamakan keselamatan rakyat di atas kepentingan elektoral. Politik yang faham bahwa melindungi warga adalah bentuk tertinggi dari ibadah sosial.

Kepemimpinan seperti ini bukan hanya membuat daerah aman; ia membangun kredibilitas, kepercayaan publik, dan sekaligus memperkuat citra PKS sebagai partai yang memadukan nilai dengan kompetensi.



Pegangan Politis & Elegan:

Agenda Strategis Untuk Kepala Daerah PKS





1 Tetapkan Ketangguhan sebagai Narasi Kepemimpinan

Di tengah musim yang berubah-ubah, jadikan pesan utama kepemimpinan Anda sederhana:
"Melindungi rakyat adalah prioritas politik tertinggi."
Narasi ini membangun legitimasi, loyalitas publik, dan membedakan Anda dari pemimpin lain yang hanya hadir setelah kamera media datang.

2 Gunakan Tata Ruang sebagai Instrumen Politik Keberpihakan

Penataan ruang bukan dokumen teknokratik; ia adalah keputusan politik.
Beranilah menolak perizinan yang membahayakan rakyat.
Beranilah menata ulang permukiman padat di zona rawan.
Keberanian ini mungkin tidak populer, tetapi inilah saat ketika populisme harus tunduk pada keselamatan rakyat.

Pemimpin PKS tidak cukup baik bila hanya bersih; ia harus berani.

3 Anggaran Bencana =Anggaran Keadilan

Banyak kepala daerah terjebak pada proyek mercusuar; padahal rakyat miskin lebih butuh drainase yang benar, tanggul yang kokoh, informasi yang cepat, dan akses pemulihan yang adil.

Arahkan anggaran agar:
- risiko ditekan sebelum bencana,
- warga rentan menjadi prioritas,
- pemulihan tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi lokal.

Ketika anggaran berpihak pada mereka yang paling rentan, itu bukan sekadar keputusan teknis—itu keputusan politik.



4 Tunjukkan Sentuhan Nilai dalam Manajemen Risiko

Pemimpin PKS harus tampil berbeda: bukan sekadar manajer, tetapi murabbi sosial. Yang:

- mendengar keluhan warga langsung,
- hadir lebih cepat dari berita buruk,
- menghidupkan kembali gotong royong,
- menumbuhkan akhlak lingkungan.

Dalam banyak situasi, sentuhan nilai jauh lebih membekas daripada seremonial.



5 Kendalikan Polusi Informasi dan Birokrasi Lambat

Bencana selalu melahirkan dua gelombang: **gelombang air — dan gelombang hoaks.** Kendalikan keduanya.

Gunakan komunikasi publik yang jernih, cepat, dan tegas.



Bangun pusat informasi terpadu yang tidak menyesatkan warga.

Pemimpin PKS harus dikenal sebagai pemimpin yang "bicara jelas, bertindak cepat, bekerja nyata."

6 Bangun Legasi: Daerah Tangguh adalah Daerah Mandiri

Legasi kepala daerah bukan pada baliho, tetapi pada sistem: *

- tata ruang yang disiplin,
- data risiko yang akurat,
- masyarakat yang terlatih,
- pertanian yang adaptif,
- dan birokrasi yang responsif.

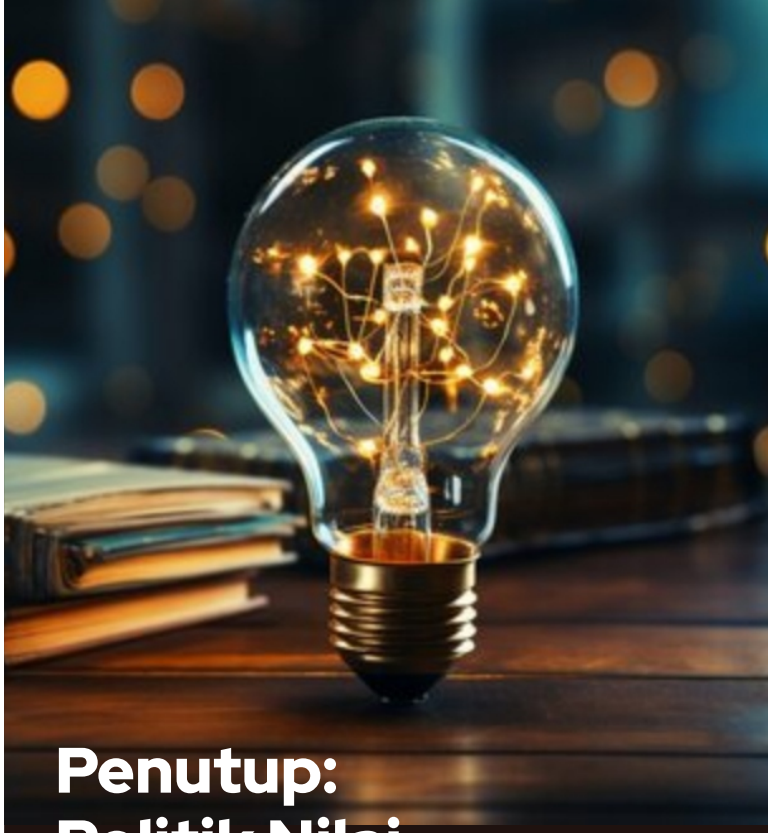
Jika sistem sudah bekerja, pemimpin boleh pergi—dan rakyat tetap terlindungi. Itulah legasi yang tidak lekang oleh pemilu.

"Politik yang mengutama-kan keselamatan rakyat di atas kepentingan elektoral. Politik yang faham bahwa melindungi warga adalah **bentuk tertinggi dari ibadah sosial.**"

7 Jadikan Ketangguhan Daerah sebagai **Keunggulan Politik PKS**

Keberhasilan menghadirkan daerah yang aman dari banjir, tertib dalam tata ruang, kuat dalam pangan, dan cepat pulih dari krisis akan menjadi bukti paling nyata bahwa PKS bukan hanya partai yang bersih, tetapi juga mampu memerintah.

Ketangguhan adalah "modal politik masa depan"—bagi kepala daerah, bagi partai, dan bagi bangsa.



Penutup: Politik Nilai, Politik Akal Sehat, Politik Keselamatan

Indonesia membutuhkan pemimpin yang melihat lebih jauh dari siklus jabatan.
Pemimpin yang mengerti bahwa kesejahteraan dimulai dari keselamatan.
Pemimpin yang memahami bahwa politik bukan arena adu slogan, melainkan komitmen menjaga kehidupan.

Kepala daerah PKS memiliki peluang untuk menunjukkan standar baru: **kepemimpinan yang berani, bersih, dan berpihak pada hidup rakyat.**

Jika berbicara adalah dakwah, maka melindungi rakyat adalah dakwah yang paling tinggi.

Jalan Menuju Kesejahteraan

Pangkas Underground Economy & Rent Seeking



Oleh: **MOHAMAD SOHIBUL IMAN, PH. D**
Anggota DPR RI | Ketua Majelis Syura PKS

Dominik H. Enste dan Friedrich Schneider dalam salah satu tulisannya yang terbit di Journal of Economic Literature vol. 38, no. 1, March 2000, berjudul "Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences", mengungkapkan beberapa aktivitas yang merupakan bagian dari ekonomi bawah tanah (underground economy), di antaranya adalah perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, pembajakan, dan penipuan, telah membuat kerugian besar bagi perekonomian.

Aktivitas underground economy tersebut, tidak hanya menciptakan penyimpangan fiskal dengan menghindari pajak, tetapi juga menyulitkan negara dalam perumusan kebijakan ekonomi yang tepat.

Tidak hanya underground economy, praktik perburuan rente atau disebut rent seeking, juga telah merusak sendi-

Rent seeking menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pengembangan kemampuan industri manufaktur. karena fokus yang beralih dari penciptaan nilai tambah ekonomi riil ke perburuan keuntungan melalui pengaruh politik, regulasi dan birokrasi

sendi perekonomian sebuah negara. Josept Stiglizt, ekonom peraih Hadiah Nobel tahun 2001, mengungkapkan dalam bukunya The Price of Inequality (2012), bahwa rent seeking merupakan praktik di mana individu atau kelompok tertentu berupaya memperoleh pendapatan atau keuntungan ekonomi yang besar melalui pemanfaatan atau manipulasi lingkungan politik, lemahnya kebijakan dan regulasi pemerintah, tanpa menciptakan kekayaan atau nilai produktif baru bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jika menggunakan pendekatan dan estimasi yang dibuat oleh Enste dan Schneider tersebut, diperkirakan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah di negara berkembang berkisar antara 35%-44% PDB. Dengan menggunakan rata-rata 40% dari PDB Indonesia tahun 2024 sebesar Rp22.139 triliun, maka nilai kegiatan underground economy Indonesia saat ini diperkirakan bisa mencapai Rp8.855,6 triliun.

Sebuah angka yang fantastis, melebihi dua kali lipat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sekitar Rp3.842,7 triliun. Perhitungan itu selaras dengan analisis PPATK yang mencapai angka 30%-40% terhadap PDB.

Merujuk pada angka yang lebih moderat, kajian lembaga multinasional Ernst & Young (EY), memperkirakan besaran ekonomi bawah tanah di Indonesia mencapai 23,80 persen dari PDB nasional pada tahun 2023.

Temuan ini hampir setara dengan Rp 4.972,39 triliun kegiatan ekonomi di tanah air yang terjadi secara ilegal dan tidak tercatat. Angka ini jelas menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak secara signifikan dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi produktif sebuah negara setiap tahunnya.

Potensi pajak yang terdapat dalam underground economy dan rent

seeking nilainya sangat besar. Jika asumsi kegiatan underground economy Indonesia saat ini mencapai Rp4.972,39 hingga Rp8.855,6 triliun (23,80%-40% dari PDB), maka dengan tax ratio sebesar 10,4%, maka potensi penerimaan pajak Indonesia yang hilang dalam satu tahun bisa mencapai Rp517,13 triliun hingga Rp920,98 triliun.

Bandingkan dengan penerimaan pajak yang direncanakan dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Artinya, terdapat potensi penerimaan pajak yang tinggi dalam aktivitas underground economy.

Tingkat Korupsi yang Semakin Tinggi

Suburnya praktik underground economy dan rent seeking di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari tingkat korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Korupsi tidak hanya merusak mental bangsa, tetapi juga menghambat kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada umumnya korupsi juga disertai dengan praktik-praktik yang tidak sehat secara ekonomi dan keuangan. Dalam banyak kasus, dana hasil korupsi dialihkan ke kegiatan informal yang tidak tercatat, termasuk bisnis ilegal, transaksi tunai tak terlacak, hingga penghindaran pajak secara sistematis.

Setali tiga uang, praktik underground economy dan rent seeking yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Langkah Presiden Prabowo Subianto merampas aset sejumlah perusahaan untuk melakukan pemulihan kerugian negara sudah sangat tepat.



Salah satunya, mengembalikan smelter tambang timah di Bangka Belitung hasil korupsi kepada negara. Aktivitas smelter ini telah menimbulkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang sangat besar. Adapun estimasi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun akibat aktivitas pertambangan ilegal dan korupsi yang dilakukan para pemburu rente tersebut.

Memangkas Praktik Underground Economy dan Rent Seeking

Kebijakan Presiden Prabowo untuk memangkas habis praktik underground economy dan rent seeking perlu mendapat apresiasi dan dukungan yang kuat dari publik. Aksi Presiden Prabowo membongkar 1.000 tambang ilegal dan lima juta hektare lahan sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya, merupakan langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal yang sudah berlangsung selama ini. Sudah saatnya, kebocoran keuangan negara ditutup dan tindakan mencuri kekayaan negara harus segera dihentikan dengan penegakan hukum.

Salah satu upaya yang mungkin bisa segera dilakukan untuk memberangus aktivitas underground economy dan rent seeking adalah dengan mempercepat pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset.

Salah satu upaya yang mungkin bisa segera dilakukan untuk memberangus aktivitas. adalah dengan mempercepat pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset.

Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan bisa mengembalikan kerugian negara secara maksimal dengan memungkinkan negara untuk merampas aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya, tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara lebih efektif, mempermudah pemulihan aset negara, memberikan efek jera, dan mengembalikan hak rakyat.

Dengan dibongkarnya underground economy dan rent seeking, selain menyelamatkan aset fisik dalam bentuk kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan

juga keuangan negara. Selain itu, juga dapat menyelamatkan aset nonfisik, seperti, spirit berusaha kalangan muda, meritokrasi yang jujur dan adil, budaya kreatif dan inovatif.

underground economy dan rent seeking adalah jalan pintas untuk mendapat kekayaan secara instan. Oleh sebab itu, jangan sampai bangsa ini terjebak dalam normalisasi perilaku underground economy dan rent seeking yang sudah menghisap kekayaan negara dan menjauhkan masyarakat dari kata sejahtera.

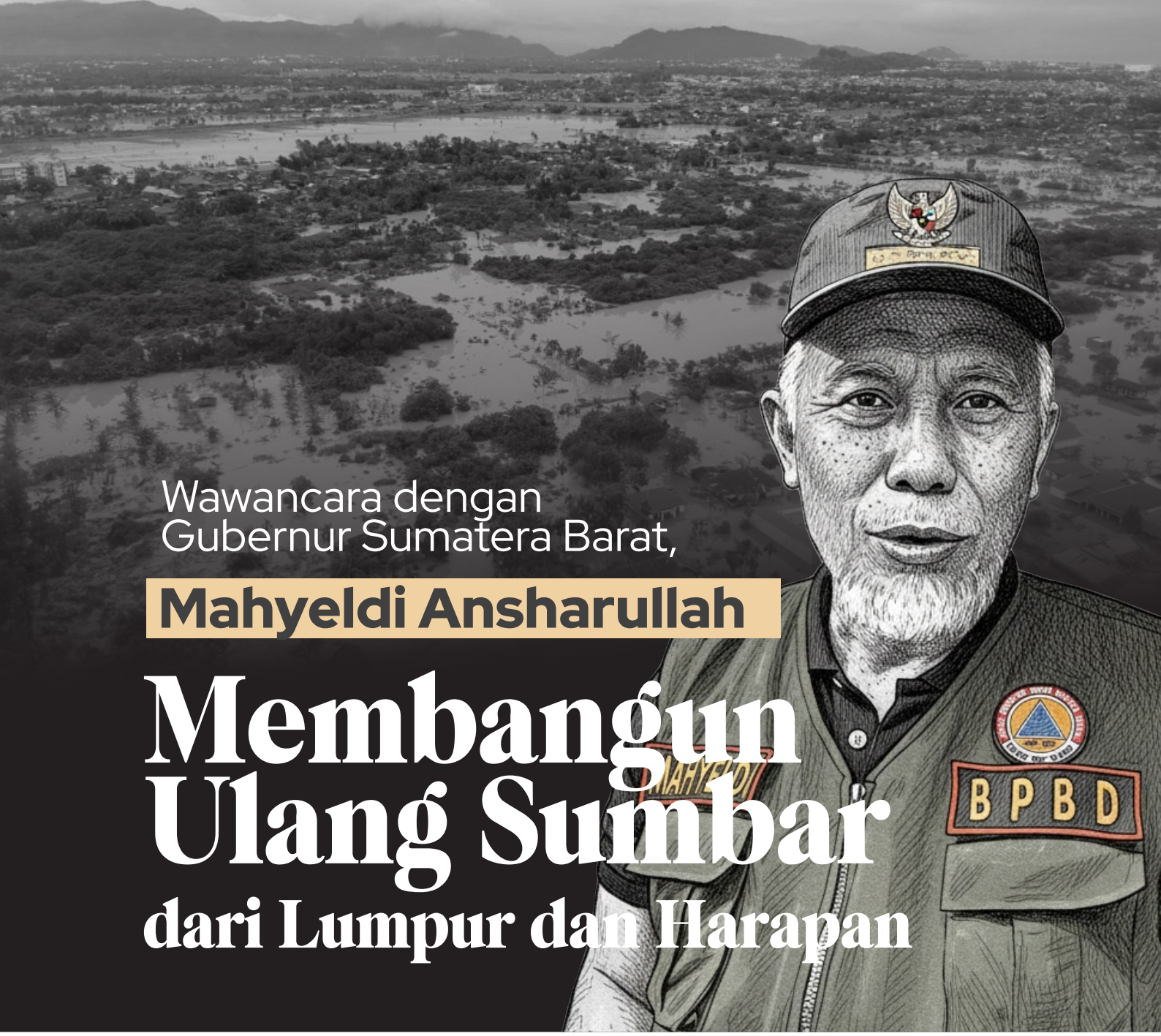
Perlu disadari oleh semua pihak bahwa praktik underground economy dan rent seeking, selama puluhan tahun di Indonesia, telah mematikan banyak unit usaha produktif. Terutama dari sisi kemampuan produksi (production capability) dan kemampuan manufaktur (manufacturing capability).



Sebagai contoh, kemampuan produksi sektor pertanian semakin menurun dalam beberapa dekade terakhir, hal ini disebabkan kurangnya minat generasi muda karena citra petani dengan pendapatan yang rendah, penyempitan lahan akibat alih fungsi yang tidak tepat, serta degradasi lahan yang diperburuk oleh perubahan iklim.

Begitupula dengan penurunan kemampuan industri manufaktur Indonesia, kontribusinya terhadap PDB hanya berkisar 18 persen per tahun. Rent seeking menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pengembangan kemampuan industri manufaktur yang kuat dan berkelanjutan.

Ini karena fokus yang beralih dari penciptaan nilai tambah ekonomi riil ke perburuan keuntungan melalui pengaruh politik, regulasi dan birokrasi. Sehingga para Gen-Z yang berniat menjadi petani sejati atau industriawan tulen akan berfikir ulang, jika jalan menuju kemakmuran lebih mudah dicapai dengan aktivitas ilegal dan perburuan rente.



Wawancara dengan
Gubernur Sumatera Barat,

Mahyeldi Ansharullah

Membangun Ulang Sumbar dari Lumpur dan Harapan

Bagaimana Anda memaknai bencana besar yang kembali melanda Sumatera Barat?

Sumbar adalah wilayah dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Di sini, banyak jenis ancaman—banjir bandang, galodo, dan longsor—berpotensi terjadi. Karena itu setiap kali bencana datang, prioritas pertama saya selalu keselamatan warga dan pembukaan akses secepat mungkin agar bantuan bisa masuk tepat waktu.

Langkah pertama apa yang Anda ambil saat laporan bencana masuk?

Pemulihan akses menjadi prioritas. Tanpa jalan yang terbuka, tidak ada logistik, tenaga medis, atau relawan yang bisa mencapai lokasi. Kami segera mengarahkan distribusi melalui jalur timur via Solok ketika akses utama terputus. Dengan kerja terpadu seluruh OPD, aparat, dan relawan, seluruh wilayah terdampak akhirnya bisa kembali diakses.

Beberapa daerah sempat terisolasi cukup lama. Bagaimana bantuan tetap bisa menjangkau mereka?

Kami memaksimalkan bantuan udara. Helikopter BNPB dan TNI AU dikerahkan untuk mengirimkan logistik ke daerah-daerah yang benar-benar tidak terjangkau melalui darat. Total bantuan udara yang dikirim mencapai lebih dari empat ton. Dalam kondisi tertentu, bantuan yang datang satu jam lebih cepat dapat menyelamatkan banyak nyawa.

Publik mengetahui Anda membatalkan Pesta pernikahan putra demi fokus menangani bencana. Apa pertimbangannya?

Di saat banyak warga kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman, saya merasa tidak tepat menggelar acara besar. Tugas saya adalah memastikan penanganan bencana berjalan baik. Keluarga memahami bahwa ada saat-saat ketika amanah harus benar-benar ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Seberapa besar kerugian yang harus ditanggung Sumbar dalam bencana kali ini?

Kerugian materinya sangat besar, mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Dengan postur APBD sekitar tujuh triliun, tentu ini tidak mudah ditangani oleh daerah sendiri. Karena itu kami mengajukan pendanaan melalui BNPB hampir tiga ratus miliar rupiah untuk tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun untuk pemulihan menyeluruh, diperlukan dukungan multi-tahun dari pemerintah pusat.

Apa kebutuhan paling mendesak masyarakat saat ini?

Normalisasi sungai, pengerahan alat berat, serta penyediaan hunian sementara. Pemerintah Kota Padang sudah memanfaatkan rumah-rumah pasca-COVID sebagai hunian sementara. Kami bekerja sama dengan balai sungai dan pihak kabupaten/kota untuk membersihkan permukiman dari kayu besar dan material berat akibat banjir bandang.

> Prioritas pertama saya selalu keselamatan warga dan pembukaan akses secepat mungkin. Pemulihan akses menjadi prioritas. Tanpa jalan yang terbuka, tidak ada logistik, tenaga medis, atau relawan yang bisa mencapai lokasi

Ada kritik bahwa bencana ini bukan hanya takdir alam, tetapi juga akibat lemahnya mitigasi. Bagaimana Anda menyikapi kritik tersebut?

Kritik itu patut didengar. Kita memang tidak boleh menyederhanakan bencana sebagai takdir semata. Ada unsur manusia—terutama dalam pengelolaan lingkungan, pengawasan lahan, dan konsistensi tata ruang. Karena itu mitigasi jangka panjang harus terus diperkuat.

Kami telah mengesahkan Perda Perhutanan Sosial dan RTRW 2025. Program Perhutanan Sosial menunjukkan hasil signifikan: tutupan hutan meningkat, pendapatan petani hutan naik, dan pengelolaan menjadi lebih inklusif. Namun implementasi RTRW masih menghadapi tantangan, termasuk penyempurnaan peta rawan bencana agar perencanaan lebih akurat.

> Sumatera Barat memiliki warisan ketangguhan yang panjang, dan kita akan bangkit bersama



Kami juga memperketat pengawasan lingkungan, termasuk di Daerah Aliran Sungai dan kawasan mangrove, dengan membentuk komite konservasi untuk memastikan kerusakan tidak berlanjut.

Dengan tantangan sebesar itu, bagaimana visi mitigasi jangka panjang Sumbar?

Mitigasi harus menjadi budaya, bukan sekadar respons setelah bencana. Kami ingin memastikan penegakan tata ruang berjalan disiplin, peta rawan bencana terintegrasi dalam perencanaan, Perhutanan Sosial terus diperkuat, dan pengawasan daerah rawan diperketat. Jika semua ini diterapkan secara serius, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan



Di saat banyak warga kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman, saya merasa tidak tepat menggelar acara besar. Keluarga memahami bahwa **ada saat-saat ketika amanah harus benar-benar ditempatkan di atas kepentingan pribadi**

Apa pesan Anda kepada masyarakat Sumatera Barat yang terdampak?

Saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak sendirian. Pemerintah hadir. Relawan hadir. Banyak pihak dari berbagai daerah ikut membantu. Sumatera Barat memiliki warisan ketangguhan yang panjang, dan kita akan bangkit bersama seperti yang telah berkali-kali kita lakukan di masa lalu.

Dan pesan Anda kepada pemerintah pusat?

Dukungan pusat sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam fase tanggap darurat tetapi juga untuk memperkuat mitigasi ke depan. Kami siap bekerja sama penuh. Ini urusan keselamatan warga dan masa depan provinsi. Di atas semua itu, ini adalah urusan bangsa.

Di Balik Banjir dan Longsor Sumatra:

Masalah Lama yang Menuntut Keberanian Baru

Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, tidak menutup-nutupi akar persoalan ketika berbicara soal banjir dan longsor yang kembali menghantam wilayah Sumatra. Dalam percakapannya dengan Kompas TV, ia menyebut satu hal yang selama ini jarang diucapkan terang-terangan: izin hak atas tanah dari Kementerian Kehutanan kepada pihak ketiga yang membuat penggunaan lahan di Sumatera tak lagi terkendali.

Menurut Mahyeldi, pola pemberian izin itu membuka pintu bagi praktik pengelolaan lahan yang mengabaikan kontur wilayah, daya dukung tanah, hingga keseimbangan ekologi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tegasnya, sudah sempat mengajukan keberatan. Mereka meminta Kementerian Kehutanan meninjau ulang kerja sama dengan pemegang izin, sebab efeknya sudah sangat nyata: kawasan rawan longsor dipaksa menanggung beban yang tidak sanggup lagi dipikul bumi.

Gubernur menekankan perlunya aturan komprehensif yang memastikan pemanfaatan hutan dan tanah berpijak pada kepentingan rakyat. “Minimal,” ujarnya, “izin itu dikonsultasikan dulu dengan pemerintah daerah sebelum diberikan.” Tanpa koordinasi, daerah seperti berjalan dengan tangan terikat menghadapi kerusakan ruang yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

Sikap Mahyeldi ini bukan sekadar

Tanpa koordinasi, daerah seperti berjalan dengan tangan terikat menghadapi kerusakan ruang yang seharusnya bisa dicegah sejak awal

kritik, melainkan pengingat bahwa mitigasi bencana dimulai dari tata kelola ruang yang benar—adil, transparan, dan berpihak pada kelestarian. Persoalan ini pun selaras dengan agenda Pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan keselamatan lingkungan sebagai prioritas strategis.

Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, suara seperti inilah yang dibutuhkan: lugas, berbasis pengalaman lapangan, dan mengajak pemerintah pusat serta daerah untuk mengatur ulang cara kita memperlakukan ruang hidup. Tanpa itu, Sumatra—dan Indonesia—akan selalu berada selangkah lebih lambat dari bencana berikutnya.





Wawancara dengan

Bang TJ (Taufik Jayadi)

Ketua Bidang Kepanduan &
Bela Negara PKS/Korlap Satgas
Penanggulangan Bencana
DPP PKS

Menembus Isolasi

Menyalakan Harapan di Sumatera

Sosok di Garis Depan PKS

Di setiap bencana besar yang melanda negeri ini, ada satu nama yang hampir selalu muncul di barisan terdepan: Taufik Jayadi, atau Bang TJ. Sebagai Ketua Bidang Kepanduan & Bela Negara PKS dan Koordinator Lapangan Satgas Penanggulangan Bencana DPP PKS, ia memimpin operasi kemanusiaan PKS dengan ketegasan seorang komandan dan empati seorang saudara.

Bang TJ dikenal bukan karena pidatonya, tetapi karena jejak langkah-nya di medan bencana. Dari Sumatera Barat ke Aceh, dari Sumatera Utara ke berbagai titik rawan, ia hadir lebih cepat dari banyak laporan formal. Bang TJ mengkordinasi dengan seluruh Relawan PKS yang ada di lapangan serta bersinergi dengan berbagai Pihak, Instansi dan Lembaga Kemanusiaan. Relawan PKS menyebutnya "penjaga ritme". Struktur menyebutnya "penghubung energi". Dan di tengah kesibukan menghadapi tiga bencana sekaligus, ia berhasil Sinergi wawancarai—tenang, lugas, tanpa dramatisasi.

Langkah pertama PKS selalu dimulai dengan asesmen. Kami harus tahu data korban, skala kerusakan, dan titik terisolir. Tanpa itu, semua keputusan bisa salah arah."

Respons Cepat PKS di Wilayah Bencana

Apa langkah awal yang dilakukan PKS ketika bencana terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh?

"Langkah pertama PKS selalu dimulai dengan asesmen. Kami harus tahu data korban, skala kerusakan, dan titik terisolir. Tanpa itu, semua keputusan bisa salah arah. Setelah asesmen, relawan PKS langsung bergerak melakukan tanggap darurat: mencari korban, menyelamatkan yang masih hidup, dan memenuhi kebutuhan dasar para penyintas."

"PKS juga membuka jalur-jalur terisolir—kadang pakai alat berat, kadang pakai tenaga relawan. Begitu akses terbuka, distribusi logistik langsung kami maksimalkan. Setelah fase darurat berjalan stabil, barulah kami susun program lanjutan agar penanganannya tidak berhenti di bantuan awal saja."

"Saya sendiri sejak awal bencana langsung ke Sumbar untuk aktivasi posko dan manajemen relawan PKS. Setelah itu bergerak ke Aceh untuk memperkuat pola koordinasi yang sama. Saat ini saya berada di Sumut memastikan seluruh relawan PKS dapat bekerja efektif."

Tantangan Krusial & Sikap PKS terhadap Penanganan Bencana

Apa yang paling mendesak dan krusial untuk ditangani di lapangan?

Ada tiga hal utama. Pertama, alat berat dan infrastruktur harus segera masuk. Tanpa itu, wilayah terisolir tidak akan tersentuh. Kedua, rumah warga yang rusak berat harus mulai diperbaiki agar mereka punya tempat kembali. Ketiga, yang paling mendesak adalah pangan. Masalah perut tidak bisa menunggu—apalagi di Aceh yang masih punya titik-titik sulit dijangkau."

Bagaimana Bang TJ melihat kondisi penanganan bencana di lapangan?

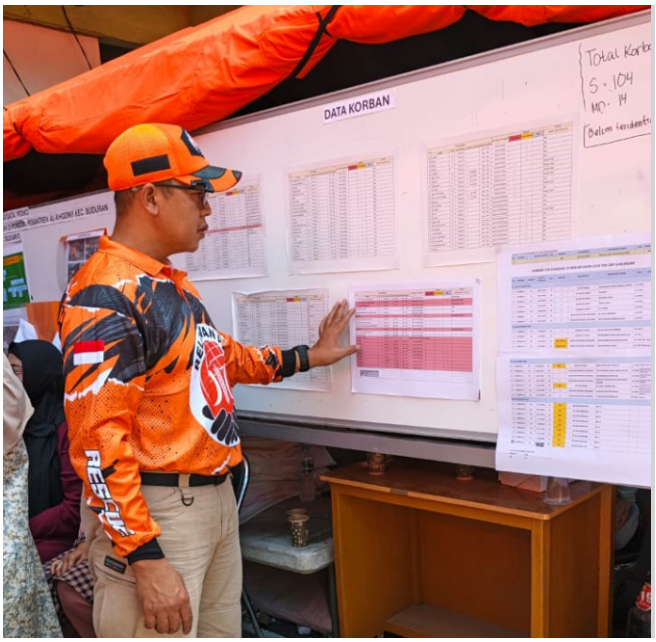
"Sedih, dan terus terang geram. Penanganan bencana relatif lambat jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang begitu besar. Status bencana pun tidak dinaikkan, padahal lihat saja dampaknya—dahsyat."

"Yang bekerja habis-habisan justru relawan PKS dan relawan lintas

lembaga. Mereka berjuang dengan segala keterbatasannya, tetapi tetap bergerak tanpa menunggu siapa pun."

Berapa banyak relawan PKS yang sudah bergerak hingga hari ini?

"Saat ini lebih dari 700 relawan PKS sudah turun. Itu gabungan dari relawan lokal, wilayah penyangga, dan relawan pusat. InsyaAllah jumlahnya akan bertambah lagi. Beberapa DPW PKS sedang siaga mengirim gelombang berikutnya, terutama ke Aceh."



Seruan Kepedulian & Hikmah dari Bencana untuk Kader PKS

Apa pesan Bang TJ kepada seluruh kader PKS di Indonesia dalam menghadapi situasi ini?

"Saudaraku seluruh kader PKS, hari ini saudara-saudara kita sedang diuji dengan musibah besar. Inilah waktu di mana ukhuwah kita diuji—bukan lewat ucapan, tetapi lewat tindakan."

"Mari bergerak cepat dalam kepedulian, satukan barisan dalam aksi kemanusiaan, jadilah cahaya harapan bagi mereka yang sedang dalam gelap, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka secara khusus."

Apa hikmah terbesar yang bisa dipetik dari bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh?

"Bencana ini mengingatkan kita pada banyak hal penting. Pertama, ketergantungan kita kepada Allah dan pentingnya muhasabah. Kedua, ia menguji sekaligus mengokohkan kesabaran dan keimanan kita. Ketiga, ia menumbuhkan kembali persaudaraan dan kepedulian sesama."

"Keempat, kita jadi sadar bahwa kesiapsiagaan kebencanaan harus ditingkatkan. Kelima, kita diingatkan untuk menjaga lingkungan dan memahami bahwa mitigasi itu tanggung jawab bersama."

"Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan: PKS harus—dan wajib—hadir di setiap situasi ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Di situlah kebermaknaan perjuangan kita."

Bang TJ menutup percakapan ini dengan kalimat yang tidak hanya mencerminkan sikapnya, tetapi juga semangat gerakan kemanusiaan PKS:

"Saat saudara kita tertimpa musibah, di situlah kita diuji apakah kita benar-benar satu tubuh. Mari bergerak. Mari peduli. Mari hadir untuk mereka. Itulah PKS."



"Saat saudara kita tertimpa musibah, di situlah kita diuji apakah kita benar-benar satu tubuh. Mari bergerak. Mari peduli. Mari hadir untuk mereka. Itulah PKS

(Bang TJ)

Langkah Awal PKS

- Asesmen data korban & kerusakan
- Relawan PKS turun untuk
  - Pencarian & penyelamatan
  - Kemanan kebutuhan dasar penyintas
- Membuka jalur terisolir (alat berat & tenaga relawan)
- Distribusi logistik ke titik paling terdampak
- Penyusunan program lanjutan pasca-darurat



Kekuatan Relawan PKS

700+ Relawan PKS sudah bergerak

Gabungan relawan lokal, wilayah penyangga, & pusat

Gab. relawan lokal, wilayah penyangga, dan pusat

Fokus penguatan: Aceh

Tantangan Krusial di Lapangan

3 Prioritas Mendesak

Akses wilayah

alat berat & infras-truktur harus segera masuk

Pemulihan hunian

perbaikan Srumah warga yang rusak berat

Pangan

suplai makanan harus cepat, teru-tama di Aceh



Sumber data :
Wawancara
Bang TJ

Srikandi di Garis Depan

Peran Istri Pejabat Publik PKS dalam Peduli Bencana

Srikandi di Garis Depan: Peran Istri Pejabat Publik PKS dalam Peduli Bencana

Di tubuh Partai Keadilan Sejahtera, politik tidak pernah berhenti pada forum-forum parlemen. Ia berdenyut sampai ke tingkat paling personal: keluarga. Di dalam keluarga pejabat publik PKS, ada prinsip yang selalu diulang dalam pembinaan: jabatan adalah amanah, empati adalah kewajiban, dan solidaritas adalah akhlak.

Maka setiap kali bencana datang, bukan hanya para pejabat publik PKS yang turun bergerak—tetapi juga istri-istri mereka, yang diam-diam memegang peran amat besar dalam merawat simpati, menguatkan masyarakat, dan menghadirkan wajah kemanusiaan negara.

Dan di antara yang memahami ini dengan dalam adalah Nevi Zuairina, Kepala Biro Pembinaan Keluarga BP3U DPP PKS sekaligus anggota DPR RI dari





> Istri pejabat publik adalah "penjaga nurani negara." Mereka bukan sekadar penguat suami, tetapi penguat masyarakat; bukan sekadar pengurus rumah, tetapi pengurus harapan.

Nevi Zuairina
Kepala Biro Pembinaan Keluarga BP3U DPP PKS
Anggota DPR RI

Dapil Sumbar II. Baginya, istri pejabat publik bukan sekadar pendamping kehidupan politik, tetapi penjaga moralitas dari amanah yang diemban suami. Di tangan para istri itulah, empati pejabat publik dirawat agar tetap hidup dan bekerja.

Ketika Bencana Menghantam, Hati Para Srikandi Lebih Dulu Bergerak

Sumatera Barat masih menyimpan duka. Banjir bandang, longsor, dan gelombang lumpur menghantam banyak titik, merusak rumah, menjebol jalan, dan menyisakan trauma panjang di lembah-lembah dan kampung-kampung.

Namun ada satu hal yang selalu muncul lebih cepat dari sirene pemerintah: langkah para perempuan—mereka yang turun bukan karena instruksi formal, tetapi karena mata perempuan selalu lebih peka melihat luka.

Nevi menyebut gerak para perempuan ini sebagai "ketangguhan sunyi"—kekuatan lembut namun kokoh, yang hadir di dapur umum, di tepi sungai yang dipenuhi lumpur, di tenda pengungsian yang dingin, di lereng yang rawan longsor, dan di rumah-rumah yang baru saja kehilangan.

Nelly Mahyeldi: Ketika Empati Mengalahkan Pesta Keluarga

Di puncak hiruk-pikuk bencana itu, terdapat keputusan yang menggambarkan esensi empati. Nelly Mahyeldi, istri Gubernur Sumatera Barat, memilih membatalkan pesta pernikahan putrinya—sebuah acara yang telah disiapkan jauh hari, dengan segala detail yang penuh cinta.

Namun bagi Nelly, pesta itu tidak pantas dipertahankan ketika rakyatnya sedang kehilangan tempat berteduh. Ia turun ke lapangan, membuka dapur


POS HEOC
POSKO BANTUAN
DAPUR UMUM
POSKO BANTUAN
DAPUR UMUM

umum, melayani korban, dan menakar kebutuhan pangan:

"Insya Allah, paket makan untuk sekitar 4.000 orang. Beras untuk 400 KK, itu rencana awalnya," ungkapnya.

Ia bekerja bukan sebagai istri gubernur, tetapi sebagai seorang ibu dari ribuan keluarga yang sedang berjuang bertahan.

Bagi Nelly, Pesta itu tidak pantas dipertahankan ketika rakyatnya sedang kehilangan tempat berteduh. Ia turun ke lapangan, membuka dapur umum, melayani korban, dan menakar kebutuhan pangan:



Nelly Mahyeldi

Istri Gubernur Sumatera Barat



Yasmiati

Menembus Lembah Sebelum Bantuan Resmi Tiba

Di Bukittinggi, Yasmiati, istri Wakil Wali Kota, bergerak jauh sebelum banjir surut. Sehari setelah bencana, ia dan tim Srikandi PKS menyusuri jalur-jalur sulit: Sungai Landia, Galudua di Ampek Koto, Balingka, Maninjau, hingga Ka Duduak Gantiang di Kabupaten Agam—wilayah yang bahkan petugas resmi masih sulit jangkau.

Ia datang membawa kebutuhan dasar ibu dan anak, makanan, selimut, dan obat sederhana. Yang lebih penting dari itu, ia membawa kehadiran—bahasa paling lembut dari negara saat warganya kehilangan harapan.



Merry Benni Warlis

Dari Agam, Solidaritas Mengalir Tanpa Henti

Di Kabupaten Agam, Merry Benni Warlis, istri Bupati Agam, tidak menunggu koordinasi formal. Ia langsung menggerakkan jaringan perempuan PKS dan relawan lokal.

Ia hadir di nagari-nagari yang terisolasi lumpur, membagikan bantuan, membesarkan hati ibu-ibu yang kehilangan lumbung pangan, dan ikut mengelola pos dapur umum di beberapa titik.

Bagi Merry, membantu korban bencana bukan program—itu adalah naluri. "Perempuan itu hatinya langsung bergerak," begitu ia meyakini.



Lian Octavia

Semangat dari Solok untuk Warga yang Terpukul

Di Kabupaten Solok, Lian Octavia, istri Wakil Bupati, menjadi salah satu yang paling cepat memobilisasi dukungan. Saat kabar pertama datang, ia menghubungi para perantau Solok, komunitas perempuan, dan kader PKS setempat untuk mengumpulkan logistik.

Lian turun langsung memantau distribusi bantuan—makanan siap saji, bantal-selimut, perlengkapan bayi, dan paket kebersihan. Ia menyebut langkahnya sederhana, tetapi bagi warga yang baru saja kehilangan rumah, kehadirannya adalah penyangga harapan.



Gusmalini

Dari Pasbar Mengumpulkan Kekuatan untuk Ibu-Ibu yang Rapuh

Di Pasaman Barat, Gusmalini, istri Wakil Bupati, bergerak dari satu tenda ke tenda lain membawa paket kebutuhan keluarga dan menenangkan para ibu yang kehilangan nafkah.

Ia tahu betul bahwa dampak bencana bagi perempuan berbeda: ada rasa takut, kehilangan privasi, dan beban ganda mengurus anak di tengah situasi darurat. Gusmalini hadir sebagai sesama perempuan yang memahami luka itu—bukan sebagai pejabat.



Melinda

Dari Lima Puluh Kota, Menenun Harapan untuk Keluarga Terdampak

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Melinda, istri Wakil Bupati, aktif mengoordinasi-kan posko dukungan perempuan. Ia bergerak cepat mengumpulkan kebu-tuhan perempuan dan anak—pembalut, pakaian bersih, selimut bayi, dan makanan tambahan.

Ia turun langsung ke daerah yang terisolasi, mendengar keluhan warga, dan mengoordinasikan suplai bantuan dari berbagai komunitas perempuan di daerahnya. Energinya menyebar dan memberi semangat relawan muda.



Benang Merah Mereka:

Empati yang Disatukan oleh Platform PKS

Jika ditarik garis besar, semua srikandi ini tampak hadir seperti barisan relawan. Padahal mereka adalah istri pejabat publik—dengan tanggung jawab sosial yang besar.

Ada tiga karakter yang menyatukan mereka, sebagaimana ditegaskan Nevi Zuairina dalam pembinaan keluarga pejabat publik PKS:

1. **Empati sebagai identitas keluarga PKS.** Bencana bagi mereka bukan tontonan, tapi panggilan iman.
2. **Solidaritas sebagai kebiasaan kader PKS.** Membantu bukan karena kamera, tapi karena nurani.
3. **Kehadiran fisik sebagai bentuk kepemimpinan moral.** Dalam bencana, sentuhan dan kehadiran lebih bermakna dari pidato panjang.

Perempuan yang Menghadirkan Wajah Kemanusiaan Negara

Nevi Zuairina sering menyebut bahwa istri pejabat publik adalah "penjaga nurani negara."

Mereka bukan sekadar penguat suami, tetapi penguat masyarakat; bukan sekadar pengurus rumah, tetapi pengurus harapan.

Dan di bencana Sumatera Barat, kita menyaksikan wajah negara yang lebih lembut, lebih hangat, lebih manusiawi—berkat langkah para perempuan ini:

Dalam aksi nyata mereka, kita menyaksikan Nelly Mahyeldi yang membatalkan pesta keluarga demi duka rakyat, Yasmiati yang menjangkau lembah-lembah sulit sebelum bantuan besar datang, Meri Beni Warlis yang menggerakkan solidaritas Agam, Lian Octavia yang mempercepat suplai kebutuhan keluarga di Solok, Gusmalini yang menguatkan para ibu yang rapuh di Pasaman Barat, serta Melinda yang menenun harapan di Lima Puluh Kota.

Mereka bukan hanya pendamping pejabat publik—mereka adalah srikandi yang menjaga hati bangsa.

Dan bangsa ini berdiri lebih kuat karena mereka ada.



Kiprah

Pejabat Publik, Struktur dan Kader PKS saat bencana

PKS Setia Mengawal Legislasi Kebencanaan!

Urgensi Mitigasi Bencana dalam Arsitektur Kebijakan Nasional

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, menempati posisi geologis yang unik sekaligus berbahaya di dalam Ring of Fire Pasifik. Kondisi geografis ini meniscayakan Indonesia sebagai salah satu laboratorium bencana alam terbesar di dunia, dengan ancaman yang bervariasi mulai dari letusan gunung berapi, gempa bumi tektonik, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang frekuensinya terus meningkat seiring dengan dampak perubahan iklim global.

Dalam konteks kerentanan yang ekstrem ini, paradigma penanggulangan bencana nasional telah mengalami pergeseran fundamental-dari yang semula bersifat responsif dan berfokus pada tanggap darurat (emergency response), menuju pendekatan yang lebih preventif, struktural, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction).

Pergeseran paradigma ini menuntut peran aktif dari lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk menciptakan payung hukum yang kokoh, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksekutif. Di dalam

> Bukan sekadar sebagai isu teknis, Fraksi PKS menempatkan mitigasi bencana sebagai manifestasi dari doktrin politiknya, yakni 'Pelayan Rakyat' (Khadimatul Ummah) dan perlindungan terhadap tumpah darah Indonesia, yang merupakan amanat konstitusional.

arena parlemen inilah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memosisikan diri sebagai entitas politik yang memberikan perhatian khusus terhadap isu kebencanaan. Bukan sekadar sebagai isu teknis, Fraksi PKS menempatkan mitigasi bencana sebagai manifestasi dari doktrin politik mereka, yakni "Pelayan Rakyat" (Khadimatul Ummah) dan perlindungan terhadap tumpah darah Indonesia, yang merupakan amanat konstitusional.

PERBEDAAN PANDANGAN PEMERINTAH DENGAN FRAKSI PKS DALAM RUU PENANGGULANGAN BENCANA

ISU	POSITIONING	IMPLIKASI
Status BNPB	**Pemerintah** (Eksekutif) Ingin diatur fleksibel melalui Perpres (Peraturan Presiden), tidak perlu eksplisit dalam UU. **PKS** (Legislatif) Harus diatur dalam UU, menolak penurunan status hukum.	**Implikasi** **Pandangan PKS** **Agar BNPB menjadi lembaga permanen, kuat, dan independen dari intervensi politik sesaat.**
Kewena-ngan	**Pemerintah** (Eksekutif) Fokus pada koordinasi antar-kementerian/lembaga **PKS** (Legislatif) Menginginkan kewenangan komando dan pelaksana, dengan hubungan garis lurus pusat-daerah.	**Implikasi** **Pandangan PKS** **Agar ada single command system yang jelas saat tanggap darurat.**
Definisi Bencana	**Pemerintah** (Eksekutif) Fokus pada bencana alam dan non-alam. **PKS** (Legislatif) memasukkan bencana sosial sebagai bencana secara komprehensif	**Implikasi** **Pandangan PKS** **Konflik sosial harus ditangani dengan standar manajemen bencana yang sama.**

Di Garis Depan Bencana Nasional

Peran Strategis PKS dalam Legislasi & Mitigasi Bencana Nasional

REALITAS INDONESIA
Bangsa di Atas Garis Risiko



Tinggal di Ring of Fire.

- 3.000 kejadian bencana per tahun.
- Kerentanan meningkat akibat perubahan iklim.

PRINSIP PKS
Nyawa Rakyat: Titik Awal Politik

Perlindungan nyawa = kewajiban negara

Legislasi sebagai benteng mitigasi

Politik tidak boleh netral dalam urusan bencana



BNPB HARUS TETAP KOKOH DI UU
Menolak penghapusan BNPB dari UU

Penurunan ke Perpres = pelemahan lembaga

BNPB harus memiliki fungsi komando, bukan sekadar koordinasi

ANGGARAN MITIGASI
Dana yang Menjaga Republik

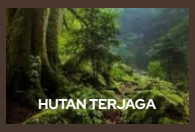
PKS mendorong 2% mandatory spending APBN/APBD

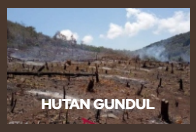
Tanpa ini, daerah dengan fiskal lemah lumpuh saat bencana. Mitigasi adalah investasi, bukan biaya.



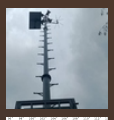
EKOLOGI SEBAGAI HULU
Menjaga Hutan = Menjaga Hidup

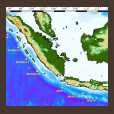
- Menolak penghapusan batas 30% tutupan hutan.
- Menolak pelemahan AMDAL.
- Kerusakan hulu = banjir dan longsor di hilir.





FUNGSI PENGAWASAN
Mengawal Negara Agar Tidak Lalai





- Mendesak perbaikan Early Warning System.
- Kritik komunikasi pejabat minim empati.
- Menolak pemotongan anggaran BNPB/ Basarnas.
- Dorong audit tata ruang pascabencana.

DESA TANGGUH BENCANA
Mendorong Dana Desa untuk Destana

- Pelatihan relawan lokal wajib.

Fokus pada 24 JAM EMAS pasca bencana



TRADISI SOLIDARITAS PKS
Politik yang Turut Menanggung Beban

- Tradisi pemotongan gaji setiap bencana nasional.
- Bantuan langsung ke titik terdampak.
- Pesan moral: wakil rakyat hadir, bukan sekadar bicara.



PESAN KETUA FRAKSI PKS
Politik yang Menjaga Kehidupan

Politik kebencanaan = politik kemanusiaan

- Negara tidak boleh absen dalam krisis.
- Mitigasi adalah investasi moral dan masa depan bangsa.



"Melindungi rakyat bukan pilihan politik –itu kewajiban negara

Dr. H Abdul Kharis Almasyhari, M.Si.
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Menata Ekosistem Informasi: Mengapa Pejabat Publik Membutuhkan Tim Penguat Pesan yang Solid

Teddy Rusmawan, AT., MM
Kabiro Pembinaan Pejabat Publik BP3U



Di era ketika algoritma bergerak lebih cepat daripada intuisi publik, para pemimpin tidak lagi dinilai hanya dari kebijakan yang mereka hasilkan, tetapi dari bagaimana kebijakan itu dipahami, dipersepsikan, dan diperbincangkan. Manuel Castells, dalam teori network society, menegaskan bahwa kekuasaan modern dibangun melalui kemampuan mengelola communication flows. Deborah Barrett menyebut komunikasi strategis sebagai "alat kepemimpinan paling menentukan abad ini"—bukan

sekadar kemampuan berbicara, tetapi kemampuan mengarahkan makna. Dan sejak Tom Peters memperkenalkan konsep personal branding kontemporer, reputasi pemimpin dipahami bukan sebagai pertunjukan panggung, melainkan sebagai konstruksi persepsi publik yang berulang, konsisten, dan terukur.

Dalam konteks ini, personal branding pejabat publik bukan lagi perkara popularitas, tetapi kejelasan nilai, kredibilitas narasi, dan keterbacaan arah kepemimpinan. Indonesia telah membuktikan berulang kali bahwa kerja baik tidak otomatis menghasilkan persepsi baik. Dalam beberapa kasus nasional, sebuah kebijakan yang substantif justru karam hanya karena framing awal dikuasai pihak yang lebih gesit mengolah opini. Di sisi lain, ada kepala daerah yang bekerja massif untuk penanganan bencana, tetapi publik tak melihat karena tak ada storyteller strategis yang merangkai kerja itu ke dalam narasi yang utuh dan dapat dipercaya. Sebagaimana dikemukakan Robert Entman, pihak yang menguasai bingkai awal dialah yang mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, dan bahkan memutuskan siapa yang dianggap pahlawan atau tersangka.

Karena itulah pejabat publik hari ini tidak cukup hanya bekerja keras; mereka memerlukan arsitektur komunikasi yang menjaga agar niat baik tidak retak di tangan misinformasi, dan agar kerja-kerja pemerintahan tidak tersembunyi di balik kabut persepsi. Di titik inilah tim penguat pesan—bukan "buzzer" dalam pemaknaan simplistis—menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem informasi tetap sehat, rasional, dan berpihak pada kebenaran.

1. Merawat Kebijakan dari Kebisingan yang Tidak Perlu

Dalam dunia digital, kualitas kebijakan sering kalah cepat dari kualitas narasi. Tim penguat pesan berfungsi sebagai kurator: menyaring, menata, dan menjelaskan setiap kebijakan agar publik

> Di era ketika algoritma bergerak lebih cepat daripada intuisi publik, para pemimpin tidak lagi dinilai hanya dari kebijakan yang mereka hasilkan, tetapi dari bagaimana kebijakan itu dipahami, dipersepsikan, dan diperbincangkan



menangkap esensinya—bukan rumor sekelilingnya. Tanpa mereka, program yang baik dapat runtuh hanya karena framing negatif yang lebih dulu viral.

Mereka memastikan diskursus publik bergerak berdasarkan data dan konteks, bukan emosi sesaat.

2. Mengalirkan Energi Positif yang Konsisten

Di tengah ekosistem yang sering dirajam sinisme, cerita baik mudah sekali tenggelam. Padahal keberhasilan kecil, kemajuan bertahap, dan empati pemimpin adalah bahan bakar psikologis bangsa.

Tim penguat pesan bekerja sebagai penyebar energi positif—bukan untuk memoles citra, tetapi untuk menjaga agar harapan publik tetap hidup dan berbasis kenyataan. Mereka mengangkat hal-hal yang layak diapresiasi, yang sering kali luput karena narasi negatif lebih cepat menyebar.

3. Menangkal Hoaks Tanpa Drama

Reputasi pejabat publik sering rapuh di tangan satu unggahan yang salah konteks. Klarifikasi lama, dan sering melelahkan seluruh lini pemerintahan.

Tim penguat pesan menjadi early responder: responsif, faktual, tenang. Mereka menangkal hoaks sebelum menjadi badai, merangkai klarifikasi dengan data, dan meredakan kegaduhan tanpa menambah drama baru.

4. Menjaga Konsistensi Brand Kepemimpinan

Kepemimpinan bukan hanya kerja teknis, tetapi juga bangunan makna. Publik perlu memahami karakter, nilai, dan arah dari seorang pemimpin. Tanpa narasi yang konsisten, pemimpin akan

> Bagi pejabat publik yang sungguh ingin bekerja untuk rakyat, tim penguat pesan adalah infrastruktur strategis Bukan tambahan. Bukan aksesori. Melainkan salah satu fondasi utama kepemimpinan di era digital

tampak kabur, tidak terbaca, dan mudah disalahpahami.

Tim penguat pesan menjadi penjaga ritme: memastikan bahwa visi, nilai, dan gaya kepemimpinan tersampaikan dengan utuh. Mereka menata storyline kepemimpinan agar publik dapat merasakan arah dan stabilitas.

5. Menghidupkan Partisipasi Publik

Komunikasi yang sehat memicu partisipasi. Dan partisipasi hanya tumbuh jika publik merasa dekat, terhubung, dan dihargai.

Tim penguat pesan membuka kanal dialog yang hangat dan informatif. Mereka membantu publik merasa memiliki saham dalam perubahan—dari sekadar penonton menjadi bagian dari gerak kolektif pembangunan.

6. Menjaga Cerita Pemimpin di Tengah Badai Digital

Setiap pemimpin membawa cerita perjuangannya sendiri: niat, nilai, dan jalan panjang yang ingin ditempuh. Namun di dunia digital yang padat informasi, cerita itu bisa koyak bahkan sebelum diperdengarkan.

Tim penguat pesan menjadi penjaga cerita, memastikan jembatan antara niat pemimpin dan pemahaman publik tidak putus. Mereka mengawal agar pesan inti tetap jernih, relevan, dan tidak terseret arus opini yang menyesatkan.

Penutup: Infrastruktur Informasi, Bukan Ornamen Politik

Membangun tim penguat pesan bukan tentang menghadirkan pasukan sorak, melainkan tentang menjaga kewarasan ruang publik. Ini tentang menata informasi, merawat harapan, melawan misinformasi, dan memastikan bahwa kerja-kerja pemerintah terbaca dengan tepat.

Bagi pejabat publik yang sungguh ingin bekerja untuk rakyat, tim penguat pesan adalah infrastruktur strategis—penyangga kredibilitas, penjaga narasi, dan penghubung antara kerja nyata dan pemahaman publik.

Bukan tambahan.
Bukan aksesori.
Melainkan salah satu fondasi utama kepemimpinan di era digital.



Saat Bencana Tak Lagi "Hanya Alam", tetapi "Sistem"

Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M.Si. CHRM, CWC
Ketua Kepemimpinan Reformasi Indonesia (KRI)

Selama bertahun-tahun, Indonesia terbiasa memandang banjir, longsor, dan banjir bandang sebagai bagian dari ritme alam: hujan deras, musim monsun, angin siklonik, gunung yang bergolak. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa bencana yang kita hadapi hari ini tidak sesederhana itu. Ada pola yang tak bisa lagi disembunyikan: banyak bencana ekologis ternyata lahir dari luka yang kita buat sendiri—deforestasi, izin tambang dan perkebunan tanpa kontrol, serta tata kelola lingkungan yang lemah.

Ketika hutan dijadikan komoditas, bukan lagi penyangga kehidupan; ketika

izin dilepas tanpa pengawasan; ketika kepentingan ekonomi mengalahkan nalar ekologis, maka masyarakatlah yang menanggung akibatnya. Bencana bukan lagi peristiwa alam yang netral, melainkan cermin retak dari sistem yang gagal.

Pada tahun 2024, Indonesia mencatat lebih dari tiga ribu bencana—kebanyakan berupa banjir, longsor, dan puting beliung. Hingga awal Desember 2025, lebih dari seribu bencana kembali terjadi, meninggalkan ribuan korban, jutaan pengungsi, serta kerugian ekonomi yang menggunung. Di Sumatra saja, kerugian ekologis dan material diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Di saat yang sama, tekanan terhadap hutan terus berlangsung. Deforestasi netto tahun 2024 masih mencapai ratusan ribu hektare, jauh melebihi kemampuan program reforestasi yang dilakukan pemerintah. Hutan sekunder, yang mestinya menjadi benteng terakhir ekologi, terus tergerus oleh ekspansi perkebunan, tambang, dan konversi lahan yang agresif.

Masalahnya bukan sebatas besarnya aktivitas ekonomi, tetapi lemahnya kontrol. Banyak proses AMDAL tertutup, data tidak sinkron, dan pengawasan kerap bersifat administratif belaka. Ketika izin dapat diterbitkan tanpa transparansi dan pengawasan, ruang gelap korupsi terbuka lebar. Dan di ruang gelap itulah bencana mulai bertunas.

Tragedi Sumatra pada November –Desember 2025 menjadi ilustrasi paling jelas betapa tipisnya batas antara alam dan sistem. Hujan ekstrem memang turun, tetapi kerusakan yang terjadi jauh melampaui kapasitas cuaca. Sungai meluap, bukit longsor, jalan dan jembatan terputus, ratusan ribu manusia terpaksa mengungsi dalam hitungan jam. Banyak warga menuding satu hal: hutan yang dahulu melindungi mereka kini telah hilang.

Pemerintah memang membentuk satgas untuk menelusuri kerusakan hutan dan pelanggaran izin tambang. Namun proses perizinan dan evaluasi lingkungan yang masih tertutup membuat masyarakat sulit mengawasi. Tanpa keterbukaan, akuntabilitas sulit menemukan jalannya.

Sebenarnya kita telah lama mengetahui akar persoalan ini. Bencana yang berkali-kali melanda daerah yang sama bukanlah kecelakaan alam,

Bencana yang berkali-kali melanda daerah yang sama bukanlah kecelakaan alam, melainkan hasil dari serangkaian keputusan yang buruk

Karena ketika alam rusak, yang menderita bukan korporasi, bukan pejabat, tetapi jutaan manusia yang hidup di kaki bukit, di tepi sungai, di desa-desa yang tak pernah ikut menandatangani izin."

melainkan hasil dari serangkaian keputusan yang buruk.

- Deforestasi melemahkan pena-han air dan merusak keseimbangan tanah.
- Perizinan tanpa transparansi dan pengawasan membuka pintu eksploitasi yang tak terkendali.
- egulasi lingkungan yang lemah membuat pelaku kerusakan hampir tak tersentuh.
- Minimnya partisipasi publik membuat masyarakat tak mampu mengontrol masa depan wilayah mereka sendiri.

Semua faktor ini berjalin, menciptakan lingkaran setan yang memperbesar risiko bencana dari tahun ke tahun. Data tutupan hutan nasional menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: semakin banyak hutan hilang, semakin sering kita menghadapi banjir, longsor, dan karhutla. Ini bukan kebetulan; ini konsekuensi.

Maka, membicarakan bencana ekologis di Indonesia hari ini bukan lagi tentang hujan deras yang turun tanpa jeda, melainkan tentang bagaimana sistem kita memberi ruang bagi krisis itu tumbuh. Jika perizinan tambang dan perkebunan tetap diterbitkan tanpa transparansi; jika pemetaan risiko tidak dikaitkan dengan data deforestasi; jika masyarakat tetap ditempatkan sekadar sebagai penonton, bukan mitra pengawas; maka bencana besar berikutnya bukanlah pertanyaan "jika", tetapi "kapan".

Karena itu, kita membutuhkan langkah yang lebih berani:

- Audit menyeluruh seluruh izin pemanfaatan lahan,
- Pemetaan silang antara pusat aktivitas ekstraktif dan frekuensi bencana,
- Keterbukaan penuh data AMDAL dan proses perizinan,



- dan penegakan hukum lingkungan yang tidak berhenti di meja administratif.

Pada akhirnya, bencana yang kita hadapi hari ini bukan hanya tentang alam yang marah, tetapi tentang manusia yang alpa. Tentang keputusan yang dibuat tanpa memikirkan daya dukung bumi. Tentang sistem yang membiarkan kerusakan berakar begitu dalam.

Dan seperti semua sistem, ia bisa diperbaiki—jika ada keberanian untuk melihat bencana bukan lagi sebagai musibah, tetapi sebagai pesan keras tentang apa yang salah di tubuh kebijakan kita.

Karena ketika alam rusak, yang menderita bukan korporasi, bukan pejabat, tetapi jutaan manusia yang hidup di kaki bukit, di tepi sungai, di desa-desa yang tak pernah ikut menandatangani izin.

Merekalah yang membayar harga dari sistem yang dibiarkan retak.

Dan mereka pulalah yang berhak atas perubahan.

Bekasi, 8 Desember 2025



IWAN AGUSTIAWAN FUAD adalah praktisi kebijakan publik dengan lebih dari lima belas tahun pengalaman dalam manajemen ASN, reformasi birokrasi, serta tata kelola wa-kaf dan pembangun-an desa. Ia terbiasa bekerja lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dengan rekam jejak kuat mengawasi penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN di tingkat nasional.

Di pemerintahan, ia pernah menjadi Asisten Komisioner KASN, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, serta anggota Pokja KEIN untuk industrialisasi desa. Iwan terlibat dalam penyusunan kebijakan wakaf, pengawasan ribuan nazir, perancangan model pembangunan kawasan desa, hingga penyusunan berbagai roadmap dan RPJMD daerah. Pengala-mannya diperkuat melalui studi perbandingan tata kelola ASN ke Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara lain.

Di luar pemerintahan, Iwan berpengalaman memimpin lembaga sosial dan korporasi seperti Baitulmaal Muamalat dan grup Sofyan Hotel. Ia juga aktif mengajar di perguruan tinggi, memimpin Konsorsium Kepemimpinan Reformasi Indonesia, serta berperan dalam Gerakan Desa Emas dan Gerakan Wakaf Indonesia. Kombinasi pengalaman birokrasi, akademik, dan pembangunan kawasan menjadikannya salah satu konsultan kebijakan publik yang menonjol di Indonesia.

Bencana Sistemik:

Tagihan dari Kerusakan Ekologis & Kegagalan Sistem

Eskalasi Dampak Kemanusiaan (2024-2025)

Meskipun frekuensi bencana sedikit menurun, daya rusaknya meningkat drastis. Bencana hidrometeorologi mendominasi 90% dari total kejadian.

Data Dampak	2024	2025 (Hingga Desember)
Korban Jiwa (Meninggal)	**480 jiwa**	**800 jiwa** Jumlah korban jiwa melonjak hampir dua kali lipat
Populasi Terdampak	**5.6 juta jiwa**	**10.2 juta jiwa** Lonjakan Signifikan

Status Darurat

Bencana Hidrometeorologi mendominasi 99% dari total kejadian

Harga Mahal Kerusakan Alam

Bencana menciptakan kemiskinan struktural baru

- Estimasi Kerugian Ekonomi akibat bencana di Sumatra pada November 2025 mencapai Rp 68,67 Triliun.
- Kerugian ini menghancurkan infrastruktur vital (jembatan, jalan) dan menghilangkan ribuan rumah serta lahan pertanian produktif.
- Nilai kerugian melebihi total APBD beberapa provinsi sekaligus

Akar Masalah: Deforestasi Legal

Mayoritas deforestasi terjadi di dalam area yang memiliki izin resmi dari negara, yang disebut sebagai "legalisasi" kerusakan.

- Total Deforestasi Netto 2024: **261.575 Hektare.**
- Deforestasi Akibat Konsesi Pemerintah (Sawit, Tambang, Kayu): **153.498 Hektare.**
- Fakta Kunci: **1,4 juta hektare hutan di Aceh & Sumatra Utara** hilang akibat 631 perusahaan pemegang izin (2016-2025)

Lingkaran Setan Bencana Sistemik

1. **Izin Tanpa Kontrol:** Pemerintah menerbitkan izin tambang & perkebunan tanpa transparansi dan AMDAL yang layak.
2. **Deforestasi Masif:** Hutan pembendung air hilang, tanah menjadi labil, dan kehilangan daya serap.
3. **Pemicu Cuaca:** Hujan deras turun, dan tanpa hutan, air langsung menghantam permukiman.
4. **Bencana Katastropik:** Banjir bandang & longsor menelan korban jiwa rakyat kecil, bukan pemegang izin

ESTIMASI KERUGIAN (SUMATRA, NOV 2025)

Rp68,67 Triliun

Tuntutan Akuntabilitas (Status Darurat)

Untuk mencegah bencana besar di masa depan, akuntabilitas harus ditegakkan.

- Audit Menyeluruh: Periksa ulang seluruh izin tambang dan perke-bunan di zona rawan bencana.
- Transparansi Data: Buka data AMDAL dan peta konsesi kepada publik secara luas.
- Penegakan Hukum: Sanksi tegas bagi korporasi dan pejabat yang terbukti melanggar aturan lingkungan

Parpol, Krisis Iklim, dan Pertaruhan Masa Depan Indonesia

Prof. Dr. Erma Yulihastin
Ahli Klimatologi dan Profesor di bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim

Kita hidup di era ketika suhu bumi bukan lagi sekadar naik; ia melonjak. Data satelit global menunjukkan bahwa sejak 2020, kenaikan suhu telah stabil di kisaran 1,5°C—angka yang dulu hanya jadi prediksi, kini berubah menjadi realitas sehari-hari. Persis seperti yang dikatakan Sekjen PBB António Guterres: bukan lagi global warming, melainkan global boiling—bumi yang seolah mulai mendidih.

Krisis ini bukan metafora. Ia menjelma dalam bentuk musim yang tak menentu, hujan yang tak kenal ampun, angin ekstrem yang datang tanpa permisi. Indonesia—negara kepulauan yang hidup di antara garis-garis angin dan lautan—menghadapi babak baru dari geografi bencananya. Di wilayah monsunal seperti Sumatra Selatan dan Jawa, musim hujan memanjang, namun ironisnya deret hari kering juga ikut bertambah. Cuaca ekstrem—hujan dan angin—diproyeksikan meningkat drastis hingga 2050, terutama di Sumatra, yang kini menjadi panggung utama aktivitas badai tropis.

Kenyataan ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan persoalan politik. Dan seperti semua persoalan politik, ia menuntut aktor: seseorang atau sesuatu yang berani mengambil sikap. Di level negara, aktor itu adalah Partai Politik.

Ketika Cuaca Mengguncang Ekonomi Global

Dalam laporan Global Economic Forum 2025, krisis iklim menembus peringkat tiga besar ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Ini bukan lagi isu aktivis atau catatan kaki dari para ilmuwan; ini adalah variabel strategis yang menentukan apakah sebuah negara berkembang atau tersungkur. Indonesia—dengan jutaan penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor berbasis cuaca—tentu berada di garis depan risiko itu.

Namun yang menarik (dan agak menyedihkan), sampai hari ini belum ada satu pun partai politik di Indonesia yang benar-benar leading dalam isu



perubahan iklim. Padahal, mereka punya peran yang terlalu besar untuk diabaikan.

Parpol Sebagai Pembuat Kebijakan: Dari Ruang Rapat ke Ruang Hidup

Parpol bukan sekadar mesin elektoral. Mereka mengendalikan parlemen, menyusun undang-undang, menentukan arah budget negara, bahkan mengatur bagaimana hutan dilindungi atau dibabat.

Mereka bisa memilih untuk:

- mendorong RUU Energi Baru Terbarukan,
- memperkuat perlindungan gambut,
- memperluas moratorium izin sawit,
- dan mengalokasikan anggaran serius untuk adaptasi iklim dan energi hijau.

Atau...
mereka bisa memilih untuk tetap diam. Dan diam, dalam isu iklim, adalah bentuk lain dari partisipasi dalam kehancuran.

Parpol Sebagai Penjaga Ideologi dan Penafsir Nilai Publik

Dalam sistem demokrasi kita, parpol adalah wali dari ideologi. Termasuk partai-partai berlandaskan agama, yang semestinya bisa membaca isu ini sebagai bagian dari mandat kekhalifahan: menjaga bumi, menjaga manusia, menjaga keadilan.

Karena ketika krisis iklim melanda, yang pertama tumbang bukanlah mereka yang kuat. Yang tumbang adalah mereka yang rapuh: **perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan para pekerja yang hidup dari alam.**
Dengan kata lain, ini bukan semata masalah lingkungan—ini masalah keadilan. Climate justice. Dan parpol punya ruang moral sekaligus politik untuk bicara di dalamnya.

Generasi Muda Sudah Bergerak—Parpol Mau Ke Mana?

Pada 2029, pemilih milenial dan Gen Z akan mencapai 55–58% populasi pemilih Indonesia. Generasi muda ini semakin lantang menuntut kebijakan prolingkungan. Mereka tahu bahwa 20–30 tahun lagi, krisis iklim bukan lagi wacana; itu adalah masa depan mereka

sendiri.

Yang menarik: isu ini sudah populer di kalangan mereka, bersanding dengan isu lapangan kerja. Karena bagi anak-anak muda, ekonomi hijau adalah bukan ancaman, tetapi peluang.

Sayangnya, parpol masih sibuk dengan isu klasik yang sudah usang. Padahal generasi muda menunggu pemimpin yang berani bicara tentang masa depan—bukan sekadar masa jabatan.

> Kita membutuhkan partai yang melihat jauh: melihat krisis sebagai peluang inovasi, melihat bumi sebagai amanah, melihat kebijakan sebagai alat perubahan—bukan alat bertahan

Dunia Bergerak ke Ekonomi Hijau. Indonesia Mau Lambat Sampai Kapan?

Green financing, carbon credit, dan permintaan internasional atas produk-produk berkelanjutan (kopi bersertifikat, sawit hijau, komoditas rendah emisi) sedang naik daun. Jika parpol tak mengintegrasikan isu ini ke platform ekonomi, Indonesia akan tertinggal jauh.

Lebih dari itu: ekonomi hijau membuka lapangan kerja baru, lebih stabil, dan lebih berjangka panjang dibanding eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus. Parpol perlu menjelaskan hal ini kepada konstituen, bukan sekadar melempar jargon.

Pertaruhan 2060: Komitmen atau Janji Kosong?

Indonesia telah berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca hingga net-zero pada 2060. Itu adalah komitmen publik di panggung global—tetapi tanpa parpol, komitmen itu hanyalah angka di kertas.

Karena setiap kebijakan iklim, dari energi terbarukan hingga tata ruang, harus disahkan, didorong, dinegosiasikan, dan dikawal oleh parpol. Tanpa mereka, semua janji tinggal retorika.

Dan hari ini, tidak ada satu pun parpol yang berdiri paling depan untuk isu lingkungan dan perubahan iklim. Padahal ruang politik untuk menjadi pelopor masih terbuka lebar.

Penutup: Siapa yang Berani Menjadi Parpol Masa Depan?

Krisis iklim adalah ujian terbesar bagi politik Indonesia. Ia menguji keberanian parpol untuk keluar dari rutinitas, menguji sejauh mana mereka benar memahami aspirasi publik, terutama generasi muda.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia akan ditentukan bukan oleh siapa yang paling keras kampanye,

tetapi siapa yang paling serius melindungi bumi tempat rakyatnya hidup.

Kita membutuhkan partai yang melihat jauh:
melihat krisis sebagai peluang inovasi,
melihat bumi sebagai amanah,
melihat kebijakan sebagai alat perubahan—bukan alat bertahan.

Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan:
Siapa yang berani menjadi parpol pertama yang menjadikan isu lingkungan sebagai jantung perjuangan?

Karena masa depan Indonesia tidak menunggu siapa pun. Ia bergerak. Ia memanas. Ia memanggil.



Prof. Dr. Erma Yulihastin

adalah seorang Ahli Klimatologi dan Profesor di bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim, dengan spesialisasi pada Cuaca dan Iklim Ekstrem, yang saat ini bertugas di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Beliau menempuh seluruh pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung (ITB), mulai dari Sarjana Geofisika dan Meteorologi (1997-2002), Magister Ilmu Kebumian (2012-2014), hingga meraih gelar Doktor Ilmu Kebumian (2016-2020). Minat penelitian utamanya meliputi meteorologi mesoskala dan dinamis, klimatologi, interaksi udara-laut, pemodelan numerik, serta perubahan iklim.

Sebagai peneliti aktif, Prof. Erma telah memimpin dan terlibat dalam berbagai proyek strategis yang didukung oleh hibah kompetitif. Beliau saat ini memegang hibah penelitian RIIM-LPDP untuk Sistem Prediksi Garam guna Ketahanan Produksi Pangan Nasional (2023–2025) serta hibah BRIN untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan dan aplikasi Kecerdasan Buatan (AI) untuk biodiversitas pada tahun 2023. Sebelumnya, beliau juga menerima pendanaan untuk Fasilitasi Hari Layar (2022-2023), Riset Prioritas Nasional (2020-2021), serta Travel Grant dari American Geophysical Union pada tahun 2017.

Dalam ranah publikasi ilmiah, Prof. Erma memiliki H-Index 11 dan I-Index 14, dengan karya-karya terbaru yang membahas dampak El Niño, banjir Jakarta, dan siklon tropis di jurnal internasional bereputasi. Penelitian-penelitian terbarunya pada tahun 2025 menyoroti kinerja model prakiraan cuaca musiman dan efek daratan pada sistem konvektif. Dedikasi beliau bermuara pada pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis prediksi cuaca dan iklim untuk aplikasi sektor luas guna mendukung kebijakan berbasis sains di Indonesia.

3 Intruksi Presiden PKS

Kepada para pejabat publik PKS– Anggota DPR RI, DPRD, serta para kepala daerah

1 Pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan.

Ini bukan sekadar mekanisme adminis-trasi; ini adalah pesan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib berpihak pada rakyat dalam keadaan paling sulit.

2 Mengoptimalkan fungsi anggaran dan pengawasan.

Pastikan setiap rupiah bantuan pemerintah—baik pusat maupun daerah—mengalir cepat, tepat, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi.

3 Koordinasi intensif lintas lembaga.

Penanganan bencana tidak mengenal sekat instansi. Pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, relawan, semuanya harus bergerak sebagai satu tubuh.

> Gerakan kemanusiaan PKS bukanlah sekadar respons cepat; ia ada-lah komitmen jangka panjang—komitmen untuk berada bersama rakyat hingga mereka dapat berdiri kembali di tanah mereka sendiri



Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Presiden PKS

PKS

Bagi siapapun, Masyarakat
yang ingin meringankan beban korban
bencana bersama Kami.

Silakan hubungi Kantor DPW
di setiap Provinsi.

Semoga menjadi tanda kepedulian dan
keberkahan untuk kita semua
untuk membuat korban bencana
bangkit kembali.


DOK. PKS ACEH






DOK. PKS SUMUT


DOK. PKS SUMBAR





SATGAS TANGGAP BENCANA NASIONAL
DPP PKS